

Statistisi Jawa Barat Ber-opini Konsentrasi Isu Ekonomi 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**



Statistisi Jawa Barat Ber-opini Konsentrasi Isu Ekonomi 2020



Statistisi Jawa Barat Ber-Opini

Konsentrasi Isu Ekonomi

2020

ISBN : 978-602-5745-80-5

Nomor Publikasi : 32000.2159

Katalog : 1205039.32

Ukuran Buku : 14,8 x 21,0 cm

Jumlah Halaman : viii + 107 halaman

Naskah : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar Sampul : BPS Provinsi Jawa Barat

Penyunting : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar Foto Sampul : Humas BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh : BPS Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Statistisi Jawa Barat Ber-Opini

Konsentrasi Isu Ekonomi

2020

- Pengarah : Dyah Anugrah Kuswardani
- Penyiapan Naskah : Isti Larasati Widiastuty
Hari Afdani
Sidik Edi Sutopo
Asnafiya Asrof
- Desain Cover dan Tata Letak : Isti Larasati Widiastuty
- Kontributor/Penulis : Ani Saebani
Asep Hermansyah
Dadan Rukmantara
Fitria Nur Diana
Gilang Abdul Aziz
Isti Larasati Widiastuty
Marisa Intan
Muhamad Rikiansyah
Muhamad Sobari
Nono Suharno
Perdy Irmawan Prayitno
Sarah Nurlaily
Vira Wahyuningrum
Yana Hendriana

Pengantar



Agenda perubahan Statistisi Jawa Barat ber-Opini merupakan upaya mendorong gerakan cinta data dari seluruh statistisi di BPS se-Provinsi Jawa Barat. Statistisi tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan penyedia data statistik. Namun statistisi memiliki peran lebih, yaitu menyajikan data yang dihasilkan agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Statistisi Jawa Barat ber-Opini Konsentrasi Isu Ekonomi 2020 merupakan publikasi kompilasi opini dari statistisi BPS se-Provinsi Jawa Barat edisi ke-6. Pada publikasi ini tersaji berbagai buah pemikiran statistisi terkait isu utama Sensus Penduduk 2020, disamping kondisi sosial masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Semoga adanya publikasi ini semakin meningkatkan semangat statistisi untuk menulis. Harapannya, seluruh statistisi di BPS se-Provinsi Jawa Barat mampu mengomunikasikan data statistik dengan mudah dan kreatif.

Bandung, Desember 2021
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dyah Anugrah Kuswardani'.

Dyah Anugrah Kuswardani

Daftar Isi

Capaian Inflasi 2019	1
<i>Perdy Irmawan Prayitno</i>	1
Apa Kabar Inflasi 2020?.....	5
<i>Muhamad Rikiansyah</i>	5
Indonesia Menuju Ekonomi Digital.....	10
<i>Ani Saebani</i>	10
Mau Kemana Pertanian di Kabupaten Kuningan? (Pengamatan terhadap hasil pertanian tanaman pangan 2018 – 2019).....	15
<i>Nono Suharno</i>	15
Babak Baru (Penghitungan) Inflasi	23
<i>Yana Hendriana</i>	23
Inflasi dan Daya Beli	27
<i>Ani Saebani</i>	27
Virus Corona Membuat Pariwisata Lesu.....	29
<i>Sarah Nurlaily</i>	29
Anomali Inflasi di Masa Pandemi.....	32
<i>Yana Hendriana</i>	32
Menanti Lahirnya Petani Milenial.....	36
<i>Gilang Abdul Aziz</i>	36
Belajar dari Inflasi Ramadan yang tak Biasa.....	41
<i>Muhamad Rikiansyah</i>	41
Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal yang Masuk ZEE Indonesia, Biar Jera!	47

<i>Muhamad Sobari</i>	47
Ekonomi di Tahun Pandemi Covid-19.....	53
<i>Ani Saebani</i>	53
Mengulik Deflasi Kota Bandung.....	58
<i>Vira Wahyuningrum</i>	58
Basis Data UMKM.....	61
<i>Isti Larasati Widiastuty</i>	61
Peran Pertanian dalam Menghindar dari Krisis Ekonomi di Kabupaten Kuningan	66
<i>Asep Hermansyah</i>	66
Hunian Hotel pada Masa Pandemi.....	74
<i>Vira Wahyuningrum</i>	74
Membangun Asa Digitalisasi Refleksi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional	78
<i>Perdy Irmawan Prayitno</i>	78
Ceruk Ekspor Jawa Barat di Tengah Pandemi.....	83
<i>Marisa Intan</i>	83
Masa Depan Ekonomi Indonesia.....	89
<i>Perdy Irmawan Prayitno</i>	89
Resesi di Tengah Pandemi.....	93
<i>Perdy Irmawan Prayitno</i>	93
Kilas Balik Indonesia Tahun 2020	98
<i>Fitria Nur Diana</i>	98
Pandemi dan Pariwisata di Akhir 2020.....	104
<i>Dadan Rukmantara</i>	104

Capaian Inflasi 2019

Perdy Irmawan Prayitno

Statistisi BPS Kota Depok

Tahun 2019 telah berlalu. Pastinya tahun tersebut meninggalkan catatan tersendiri untuk setiap orang bahkan untuk suatu negara. Catatan yang tentunya dapat dijadikan renungan dan motivasi untuk menghadapi tahun yang baru.

Satu dari sekian banyak catatan yang seharusnya dijadikan renungan untuk suatu negara adalah kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menjamin kestabilan harga bagi masyarakatnya, khususnya bahan pangan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah jaminan pemerintah terhadap kestabilan harga?

Kinerja pemerintah pusat maupun daerah terhadap kestabilan harga dapat diukur dari tingkat inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.

Inflasi ibarat tensi darah yang tidak baik jika terlalu rendah atau terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif negatif bagi pelaku ekonomi dalam memproduksi. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat yang berimbas pada permintaan. Tingkat inflasi seharusnya terkendali pada kondisi idealnya. Menurut beberapa pakar ekonomi, inflasi ideal untuk kondisi perekonomian Indonesia adalah 3 persen.

Tingkat inflasi Nasional tahun 2019 telah memenuhi target. Inflasi Nasional selama 2019 tercatat sebesar 2,72 persen atau masuk ke dalam target 3,50 persen dengan deviasi 1 persen. Selain itu, tingkat inflasi Nasional tercatat menjadi yang terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini merupakan sebuah prestasi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan, sehingga akan berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Inflasi Kota Depok

Kondisi inflasi Kota Depok belum se"indah" kondisi inflasi Nasional. Di penghujung tahun 2019, Kota Depok "finis" di urutan ke-74 dari 82 kota inflasi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Dan peringkat ke-6 dari 7 kota inflasi di Jawa Barat atau hanya lebih baik dari Kota Bekasi (4,28 persen). Inilah capaian yang dapat diraih Kota Depok pada 2019 dari sisi peringkat.

Pada 2019, peringkat inflasi Kota Depok jauh menurun dibanding lima tahun terakhir. Kalau biasanya berada di peringkat pertengahan bahkan pernah mencapai peringkat ke-13 dari 82 kota inflasi dengan tingkat inflasi sebesar 1,87 persen pada tahun 2015 silam. Pada tahun yang sama, capaian inflasi Kota Depok di Jawa Barat hanya kalah dari Kota Cirebon (1,56 persen). Hal ini bukan berarti tidak ada upaya dari pemerintah Kota Depok selama 2019, hanya saja upaya tersebut seharusnya selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Selain itu, tingkat inflasi Kota Depok tahun 2019 sedikit "meleset" dari target Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021. RPJMD menargetkan tingkat inflasi 2019 sebesar 3,28 persen atau terlampaui sebesar 0,01 persen dari tingkat inflasi tahun 2019 (3,29 persen). Kondisi ini seharusnya menjadi renungan untuk berbenah di tahun 2020.

Sebenarnya jika dilihat dari angkanya, tingkat inflasi Kota Depok masih dalam kategori "aman" karena masuk ke dalam *range* target Nasional (3,50 persen). Angka inipun juga masih lebih baik dari tahun 2017 yang mencapai 3,93 persen.

Harapan

Bicara inflasi bukan hanya bergantung pada satu komoditas saja. Berdasarkan tahun dasar (2012), terdapat 344 komoditas barang dan jasa yang mempengaruhinya. Sepanjang 2019, dapat dikatakan pemerintah Kota Depok berhasil mengendalikan harga beras, yang merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam perhitungan inflasi. Keberhasilan ini menempatkan beras sebagai komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi.

Keberhasilan pengendalian pada harga beras tidak disertai oleh pengendalian harga komoditas lain yang sangat berpengaruh. Sebagai contoh pemerintah Kota Depok luput dalam menjaga kestabilan harga bawang merah maupun cabai merah. Sehingga kedua komoditas ini memberikan andil yang cukup besar dalam inflasi Kota Depok.

Di tahun 2020 ini, sebaiknya pemerintah Kota Depok lebih peka terhadap pergerakan angka inflasi. Salah satunya memantau komoditas yang akan memberikan andil besar terhadap inflasi tanpa mengenyampingkan komoditas lainnya. Selain itu, memperhatikan lonjakan harga yang terjadi pada momentum tertentu seperti menjelang hari raya dan pergantian tahun ajaran baru. Hal ini seharusnya sudah dapat diantisipasi karena momentum tersebut selalu terjadi setiap tahunnya.

Sementara itu, peran serta dari berbagai pihak sangat diperlukan guna mengendalikan tingkat inflasi. Pihak terkait (seperti perangkat daerah) sebaiknya ber"orkestra" sehingga menghasilkan "simfoni" yang harmonis dalam mengendalikan tingkat inflasi. Hal ini guna menjalankan strategi 4K dari Bank Indonesia, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.

Semoga pihak terkait dapat mengambil porsi serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengendalian tingkat inflasi dengan baik. Kesinergian ini sangat diharapkan dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan yang terjangkau sehingga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Apa Kabar Inflasi 2020?

Muhamad Rikiansyah

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Awal tahun ini masyarakat dihadapkan dengan kenaikan berbagai komoditas, diantaranya kenaikan BPJS, kenaikan cukai rokok, dan kenaikan sebagian rute jalan tol. Menjadi sebuah tantangan yang perlu dicermati oleh pemerintah jika tidak ingin target inflasi 2020 meleset.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan angka inflasi pada 2020 berkisar pada angka 3% ($\pm 1\%$). Target inflasi sebesar ini didasarkan pada perkembangan inflasi 2019 yang cukup rendah. Hal ini juga didukung oleh inflasi inti yang terkendali sejalan dengan kapasitas produksi domestik dan juga distribusi barang dan jasa yang membaik. Demikian disampaikan oleh Deputy Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Jika melihat perkembangan inflasi di 2019 hampir semua daerah pantauan inflasi memenuhi target inflasi 2019 sebesar 3,5% ($\pm 1\%$) sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam rilis inflasi pada awal Januari 2020 di Kantor BPS. Dalam rilisnya disampaikan dari 82 kota pantauan inflasi yang mengalami inflasi tahunan tertinggi adalah Kota Manokwari sebesar 4,76 %, diikuti Kota Bekasi dan Kota Meulaboh masing-masing sebesar 4,28%. Artinya hanya Kota Manokwari yang tidak memenuhi target inflasi 2019. Secara nasional, angka inflasi tahunan 2019 sebesar 2,72%. Sehingga wajar jika BI menetapkan proyeksi inflasi 2020 lebih kecil daripada proyeksi inflasi 2019.

Inflasi sejatinya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Inflasi dapat memperlihatkan peningkatan atau penurunan permintaan terkait komoditi di masyarakat, juga menjadi indikator perekonomian di suatu wilayah. Inflasi adalah satu indikator statistik yang sangat penting sehingga perlu mendapat perhatian ekstra. Inflasi ibarat termometer yang bisa mengukur suhu perekonomian apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Inflasi layaknya suhu tubuh memang hanya perlu dikendalikan bukan diturunkan serendah-rendahnya apalagi dihilangkan.

Kenaikan Harga Awal Tahun

Awal tahun 2020 masyarakat dihadapkan oleh kenaikan beberapa komoditas utama khususnya *administered price* atau harga yang ditentukan oleh pemerintah. Sebut saja naiknya tarif BPJS, kenaikan cukai rokok, naiknya tarif Tol Cikopo-Palimanan dan juga beberapa komoditas bahan makanan seperti cabe rawit, cabe merah, dan daging ayam ras. Tarif listrik juga santer diberitakan naik, untung saja dibatalkan untuk sementara waktu menunggu kajian yang dari PLN dan Kementerian ESDM.

Kenaikan komoditas tentu saja berdampak terhadap laju inflasi. Apalagi jika komoditas tersebut adalah kebutuhan utama masyarakat. Salah satu yang akan sangat berpengaruh terhadap inflasi secara nasional adalah kenaikan cukai rokok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 23 %. Hal ini akan berakibat terhadap kenaikan harga jual eceran rokok

sebesar 35 %. Tidak bisa dipungkiri, rokok adalah salah satu komoditas utama masyarakat Indonesia. Sekuat apapun kampanye anti rokok di Indonesia belum signifikan menurunkan jumlah konsumsi rokok. Sehingga mau tidak mau bobot rokok terhadap angka inflasi cukup besar. Yang artinya kenaikan harga eceran rokok akan berdampak signifikan terhadap angka inflasi.

Kenaikan harga untuk komoditas *administered price* memang menjadi sebuah tantangan bagi pengendalian inflasi. Berbeda dengan pengendalian harga komoditas yang bergejolak seperti pangan Harga rokok, tarif tol, dan tarif listrik, adalah contoh komoditas *administered price* yang secara alami hampir tidak pernah mengalami penurunan kembali setelah mengalami kenaikan. Sehingga ketika diawal tahun menyumbang inflasi maka sepanjang tahun akan sulit mengandalkan komoditas tersebut untuk menahan laju inflasi. Berbeda dengan komoditas pangan yang selalu mengalami fluktuasi harga. Ketika mengalami kenaikan di awal tahun dan menyumbang andil inflasi, pada bulan-bulan selanjutnya bisa mengalami penurunan dan menyumbang andil deflasi. Kejadian inflasi beras di awal tahun 2018 yang sempat membuat tensi tinggi inflasi nasional saat itu bisa menjadi contoh.

Tantangan Inflasi 2020

Selain kenaikan harga *administered price*, awal tahun 2020 juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Cuaca yang kurang bersahabat menjadi sebuah hal yang perlu dibuatkan mitigasi risikonya. Khususnya terhadap ketersediaan stok pangan dan kebutuhan masyarakat

lainnya. Jika terlambat mengantisipasi bukan tidak mungkin akan muncul permasalahan lain.

Banjir di Jakarta beberapa waktu lalu menyadarkan kita bahwa Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Jika Jakarta yang secara infrastruktur sudah sangat bagus bisa lumpuh akibat banjir, bagaimana dengan daerah lain yang belum sebagus Jakarta secara infrastruktur. Apalagi jika bencana alam terjadi di sentra pertanian atau sentra bahan baku industri maka akan sangat berpengaruh terhadap suplai komoditas kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan antisipasi antara lain dengan menyiapkan gudang-gudang di daerah untuk menampung stok kebutuhan pangan masyarakat. Melakukan impor lebih awal untuk komoditas yang memang secara penyediaan belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Memperkuat daya tahan pelaku usaha di semua sektor mulai dari pertanian, industri dan perdagangan. Selalu berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring secara bersama dan berkala agar jika terjadi permasalahan bisa segera dilakukan langkah-langkah strategis.

Peluang menahan inflasi di awal 2020 sangat terbuka. Dan ini harus dilakukan agar target inflasi yang ditetapkan pemerintah melalui BI bisa tercapai di akhir tahun. Jika ada komoditas yang terpaksa mengalami kenaikan maka pemerintah harus mencegah efek domino agar tidak terlalu berimbas terhadap komoditas lainnya. Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi pada awal tahun ini juga merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Kenaikan harga komoditas bukan sesuatu yang harus dihindari. Akan tetapi perlu dicermati sejauh mana daya tahan masyarakat terhadap kenaikan harga tersebut. Kenaikan harga akan berpengaruh terhadap inflasi, tapi sejauh inflasi masih terkendali artinya masyarakat masih bisa mengikuti pergerakan harga tersebut. Jika inflasi tak terkendali maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat menurun maka konsumsi juga menurun. Jika konsumsi masyarakat menurun akan menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Semoga di awal tahun 2020 ini semua pihak dapat membuat mitigasi dan perencanaan yang tepat terkait pengendalian inflasi. Jika inflasi terkendali, akan menjadi salah satu faktor yang membantu kelangsungan konsumsi masyarakat secara umum. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi konsumsi dapat terjaga dengan baik.

Indonesia Menuju Ekonomi Digital

Ani Saebani

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Seiring pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2019, ini terjadi di berbagai dunia termasuk Indonesia. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mengakibatkan gejolak ekonomi dunia. Namun demikian, kemajuan teknologi digital termasuk di Indonesia membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kreatif yang di dominasi pelaku UMKM untuk menuju ekonomi digital.

Saat ini dunia memasuki kemajuan teknologi digital, aktivitas manusia tidak dibatasi tempat dan waktu. Berbagai kegiatan memungkinkan dikendalikan kapan saja dan diberbagai tempat melalui jaringan internet dengan perangkat *gadget/smartphone*. Hal tersebut semakin mempermudah mobilitas manusia dalam aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan bisnis yang berbasis digital.

Meningkatnya peluang ekonomi kreatif berbasis digital tersebut diperkuat oleh hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, pengguna internet sebesar 64,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau tumbuh 10,12 persen. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pengguna internet adalah sebagian besar dari kalangan milenial yang mayoritas pada usia 15 sampai 19 tahun.

Prospek yang begitu menantang terhadap pertumbuhan ekonomi telah mengantarkan Indonesia ke pintu persaingan ekonomi di dunia. Tentunya sudah tidak bisa dielakan lagi, setiap produk-produk lokal yang ada diseluruh wilayah Indonesia harus mampu bersaing di tingkat global.

Agar produk yang dihasilkan masyarakat memiliki daya saing, tentunya hal ini menjadi bagian penting, bahwa pasar daring menjadi solusi guna memudahkan dan memperkenalkan produk kreatif mereka kepada konsumen baik nasional maupun dalam kancah global.

Berdasarkan proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan kebanjiran penduduk usia muda yang produktif. Dalam perjalannya, periode krusial tersebut oleh banyak kalangan disebut sebagai periode bonus demografi yang saat ini sudah dimulai dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada rentang tahun 2025-2030.

Periode bonus demografi tersebut dapat di lihat dengan data kependudukan dimana dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif (usia 64 lebih dan 0-14 tahun). Indikator keberadaan bonus demografi bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan yang rendah, jika dimanfaatkan peluang dari SDM tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan bonus demografi perlu memperkuat SDM yang inovatif supaya dapat memanfaatkan era disrupsi teknologi digital. Era disrupsi digital lebih mengedepankan output, inovasi yang inheren dengan

digitalisasi, melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep *sharing economy*, *internet of things*, *e-commerce*, *finansial technology*, *artificial intelligence* dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya persaingan ekonomi.

Konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*, 1995), yang bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi.

Dalam ekonomi digital setidaknya terdapat 4 hal penting yang terkait dengan aktivitas ekonomi digital, dimana letak geografis tidak lagi relevan dengan adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan big data.

Besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap *size* ekonomi digital ekonomi dapat dicermati dari perdagangan Online telah mengubah *landscape* ekonomi dunia sebagai “wajah baru” ekonomi global, mengacu pada laporan McKinsey (2018), setidaknya perdagangan daring (*online*) memiliki dampak di empat area.

Pertama, *financial benefits*. Memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, misalnya Indonesia sebagai pasar terbesar untuk *e-commerce* di Asia Tenggara. Nilainya saat ini kurang lebih 2,5 milyar dollar dan diprediksi akan menjadi 20 milyar dollar di tahun 2022.

Kedua, *job creation*. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital

ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga, *buyer benefits*. Ini bisa dilihat dari harga-harga di *marketplace e-commerce* yang biasanya lebih murah dari *offline*. Juga dimungkinkan para pembeli lebih efisien baik biaya maupun waktu dalam memesan suatu barang maupun jasa yang akan digunakan.

Keempat, *social equality*. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.

Prospek Ekonomi Digital Indonesia

BPS mencatat pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 sebesar 5,02 persen, atau melambat dibandingkan laju ekonomi triwulan III 2018 sebesar 5,17 persen. Namun demikian, laju ekonomi Indonesia untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mendukung ekonomi digital menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 9,15 persen.

Besarnya sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2019 dari lapangan usaha yang mendukung ekonomi digital, menunjukkan bahwa ekonomi digital berpeluang untuk menjadi faktor pertumbuhan ekonomi baru selain dari lapangan usaha pertanian dan pengolahan.

Dalam perjalanannya, kita dapat menyaksikan terdapat 4 usaha rintisan (*start up*) bisnis Indonesia yang berhasil menyandang status *unicorn*, atau mencatatkan

valuasi di atas USD 1 milyar, yakni Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka.

Tentunya, yang paling membanggakan adalah seluruh generasi milenial sebagai masa depan penggerak ekonomi Indonesia khususnya dari ekonomi kreatif berbasis digital.

<https://jabar.bps.go.id>

Mau Kemana Pertanian di Kabupaten Kuningan? (Pengamatan terhadap hasil pertanian tanaman pangan 2018 - 2019)

Nono Suharno

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan

Sejak abad ke-18 negara-negara di Eropa Barat telah memulai perlombaan dengan negara industri lainnya untuk memproduksi secara berlebih emisi karbon dioksida (CO₂) ke langit biru yang ketika itu masih sangat bersih. Situasi ini berlangsung terus menerus dan menimbulkan proses perusakan alam yang semakin bertambah kualitas kerusakannya. Selanjutnya kekeringan, banjir, kebakaran hutan yang terjadi diberbagai belahan dunia menjadi dampak yang mulai dirasakan oleh penduduk di seluruh wilayah, termasuk di Indonesia.

Geophysical Research Letters dalam jurnalnya sudah memberikan memprediksi bahwa tahun 2019 berpeluang menjadi tahun terpanas dalam sejarah kehidupan manusia. Hail ini terjadi selain karena El Nino atau peningkatan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik, cuaca panas juga tercipta oleh karena adanya peningkatan secara terus menerus CO₂ selama decade terakhir.

“Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau sehingga dampak yang dirasakan adalah kemaraunya menjadi lebih kering dan lebih panas dibanding tahun 2018,” kata Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/7/2019).

Dari hasil analisis BMKG ada tiga kategori klasifikasi potensi kekeringan dampak meteorologis yang tersebar di sejumlah wilayah negara Indonesia yaitu Awas, Siaga, dan Waspada. Daerah dengan potensi kekeringan kategori Awas antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

El Nino sebenarnya merupakan sebuah fenomena alami yang telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tidak selalu dengan pola yang sama. Biasanya El Nino muncul setiap 2-7 tahun sekali.

Pemanasan global dewasa ini menyebabkan terjadinya anomali iklim El Nino dan La Nina yang makin sering dan panjang durasinya. Dampak yang muncul akibat fenomena El Nino ini yakni terjadinya kekeringan. Kekeringan melanda beberapa sektor kehidupan manusia, salah satunya ialah pertanian tanaman padi.

Sebagai sektor yang sangat dipengaruhi oleh iklim, pertanian merupakan sektor yang akan merasakan dampak dari fenomena El Nino ini. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman pangan, khususnya tanaman padi yang merupakan sumber pangan pokok masyarakatnya.

Mengingat bahwa sektor pertanian dan iklim adalah dua hal yang saling berkaitan, tentunya fenomena El Nino yang terjadi akan mempengaruhi aktivitas budidaya tanaman pangan khususnya tanaman padi di Indonesia.

Terjadinya kekeringan di tahun 2019 adalah sebuah realitas yang sudah diprediksi dan sudah terjadi. Khusus

untuk di Kabupaten Kuningan yang juga menjadi daerah terdampak El Nino, angka produktifitas pertanian tanaman pangan (dalam hal ini padi) dengan menggunakan metode hitung kerangka sampel area atau KSA menunjukkan angka penurunan yang signifikan.

Angka produksi padi di tahun 2018 di Kabupaten Kuningan adalah 196.185 ton dan di konsumsi sebesar 137.970 ton artinya produksi surplus sebesar 58.215 ton atau sebesar 29,67 persen. Sementara itu pada tahun 2019 produksi padinya menjadi hanya 158.324 ton sementara konsumsinya sebesar 138.478 ton, artinya surplus nya menurun menjadi hanya 12,54 persen atau hanya sebesar 12,54 persen.

Sementara itu Kabupaten Kuningan yang kondisi perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian, maka penurunan ini dipastikan akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kisaran kontribusi kategori pertanian PDRB yang selalu berada di atas angka 23 persen dan penurunan produksi pertanian tanaman pangan di tahun 2018 ke 2019 pasti akan membuat pendapatan penduduk yang bekerja di kategori pertanian akan ikut tertekan dan turun dengan angka yang cukup besar.

Kejadian ini adalah kejadian berulang pada tahun 2015, dimana dampak El Nino ikut berpengaruh pada turunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Kuningan. Surplus produksi padi yang seharusnya bisa digunakan menjadi pendapatan lebih dari perekonomian Kabupaten Kuningan untuk tahun 2019 sepertinya malah akan menjadi faktor yang menurunkan LPE karena penurunan surplusnya yang turun secara drastis.

Kedepannya kejadian seperti ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi apabila perilaku petani dan pendampingan dari pemerintah tentang tata laksana pertanian tidak diperbaiki. Karena bila dilihat dari perkembangannya, kejadian El Nino cenderung lebih sering terjadi pengulangannya akhir-akhir ini, yaitu sekitar 2-3 tahun sekali pada kurun waktu 1981-2016, sementara kurun waktu 1950-1980 terjadi sekitar 5-7 tahun sekali.

Dampak El Nino terhadap anomali iklim di Indonesia berupa kemarau panjang dapat berpotensi mengganggu produksi padi pada musim tanam kedua, dan mengubah pola tanam untuk musim tanam berikutnya.

Dampak anomali iklim terhadap sektor pertanian antara lain:

1. Produksi dan kualitas produksi padi akan menurun drastis;
2. Berkembangnya hama penyakit tanaman;
3. Penyerbukan tidak sempurna, sehingga hasil tidak maksimal; dan
4. Musim tanam akan bergeser dengan risiko banjir (saat La Nina) dan kekeringan (saat El Nino).

Variabilitas iklim merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan sektor pertanian. Informasi iklim yang presisi sangat membantu dalam menentukan perencanaan usaha tani yang rentan dipengaruhi oleh berbagai dampak dari anomali iklim.

Manfaat prediksi iklim untuk pertanian sangat besar diantaranya:

1. Mengatur pola tanam sesuai dengan ketersediaan air;
2. Memilih komoditas dan varietas sesuai dengan prediksi iklim;
3. Upaya adaptasi lebih fokus dan tepat lokasi, seperti untuk wilayah yang diprediksi kering dapat menyediakan air melalui sumur pompa, dam parit, embung, longstorage, sedangkan untuk yang diprediksi lebih basah dapat menyiapkan sistem drainase yang baik; dan
4. Menekan kehilangan hasil akibat kekeringan atau serangan OPT.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dampak buruk perubahan iklim dapat diatasi melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat dengan dua pendekatan yaitu adaptasi dan mitigasi.

Adaptasi adalah tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim.

Sementara itu, mitigasi adalah penerapan teknologi budidaya untuk mencegah akumulasi gas rumahkaca (GRK) di atmosfer dengan mengurangi jumlah emisi dan/atau mengurangi sumber maupun peningkatan

rosot (penyerap) gas rumah kaca (Surmaini, Runtunuwu dan Las, 2011).

Menurut Irawan (2006), kebijakan penanggulangan yang bersifat menyeluruh dan melibatkan banyak pihak yang relevan diperlukan dalam rangka mengantisipasi fenomena iklim, terutama El Nino, mengingat fenomena anomali iklim dan konsekuensinya meliputi berbagai aspek yang sangat luas.

Kebijakan penanggulangan anomali iklim perlu menempuh beberapa upaya yaitu:

1. Mengembangkan sistem deteksi dini anomali iklim yang meliputi waktu kejadian, lama kejadian, tingkat anomali, potensi dampak terhadap ketersediaan air dan produksi pangan, dan sebaran wilayah rawan,
2. Mengembangkan sistem diseminasi informasi anomali iklim secara cepat dengan jangkauan yang luas kepada petani dan berbagai pihak serta instansi terkait,
3. Mengembangkan, mendiseminasikan dan memfasilitasi petani untuk dapat menerapkan teknik budidaya tanaman yang adaptif terhadap situasi kekeringan, misalnya dengan mengatur pola tanam padi-padi-padi untuk kasus La Nina dan pola tanam palawija-padi-palawija untuk kasus El Nino. Di samping itu perlu ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala dan berkelanjutan.

Pemerintah memegang peranan penting dalam membantu membimbing petani melewati masa sulit El Nino. Kementerian dituntut berperan aktif terkait dalam hal pertama yakni informasi, terdiri dari sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk petani yang melakukan diversifikasi usaha agar tetap dapat produktif.

Kemudian penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah daerah/setempat hendaknya mengatur tata penggunaan air, irigasi, termasuk ketersediaan air di waduk-waduk yang ada. Ketika kondisi lebih kritis, penggunaan pompa air untuk mengalirkan air guna menyiram tanaman yang terancam puso sangat diperlukan.

Namun, mengingat tingginya biaya operasional terutama untuk membeli bahan bakar, alternatif pembiayaan dengan mekanisme subsidi pemerintah baik untuk pembelian pompanya maupun untuk biaya bahan bakar nampaknya diperlukan (Suryani, 2015).

Sinergi penyelenggaraan usaha pertanian yang baik antara petani dan pemerintah akan sangat membantu terciptanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Las, I. 2007. Menyiasati Fenomena Anomali Iklim bagi Pemantapan Produksi Padi Nasional pada Era Revolusi Hijau Lestari. Jurnal Biotek-LIPI. Naskah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Pertanian, Bogor, 6 Agustus 2004.

Surmaini, E., Rakman, dan R. Boer.2008. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Padi: Studi Kasus Pada Daerah Dengan Tiga Ketinggian Berbeda. Prosiding Seminar Nasional dan Dialog Sumberdaya Lahan Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.

Irawan B. 2006. Fenomena anomali iklim El Nino dan La Nina: kecenderungan jangka Panjang dan pengaruhnya terhadap produksi pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Jurnal: 24(1): 28 45.<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles>. [15 Oktober 2015]

Babak Baru (Penghitungan) Inflasi

Yana Hendriana

Statistisi BPS Kabupaten Bandung Barat

Memasuki awal tahun 2020, berbagai kalangan memperkirakan tekanan inflasi di bulan Januari ini akan meningkat. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, iuran BPJS kesehatan, tarif tol dan kenaikan berbagai komoditas lainnya menjadi faktor penyebab tingginya tekanan inflasi tersebut. Kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen akan berdampak pada kenaikan harga eceran rokok di pasaran. Konsumsi rokok yang cukup tinggi menambah beban terhadap biaya hidup di masyarakat.

Senin (3/2) lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan rilis inflasi Januari 2020. Secara nasional, inflasi bulanan mencapai 0,39 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian inflasi di bulan yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 0,32 persen. Namun demikian, hasil ini juga masih di bawah perkiraan inflasi Januari oleh berbagai kalangan. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia sebelumnya memperkirakan capaian inflasi sebesar 0,46 persen (cnbcindonesia.com, 3 Februari 2020).

Inflasi Januari 2020 lebih banyak disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi diantaranya cabai merah, cabai rawit, ikan segar dan rokok. Rokok yang terdiri dari komoditas rokok putih, rokok kretek dan rokok kretek filter secara total

memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen. Inflasi rokok yang diakibatkan oleh kenaikan cukai masih belum dirasakan secara penuh di Januari ini. Kenaikan harga rokok itu sendiri berlaku untuk produksi rokok tahun 2020 yang telah menggunakan pita cukai terbaru.

Tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas juga diimbangi oleh adanya penurunan komoditas-komoditas lainnya. Komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi khususnya terjadi pada kelompok transportasi dan beberapa komoditas makanan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras.

Diagram Timbang Baru

Dalam rilisnya, BPS mengumumkan penggunaan tahun dasar baru dalam penghitungan inflasi. Mulai Januari 2020, digunakan tahun dasar 2018 menggantikan tahun dasar 2012 yang digunakan dalam penghitungan inflasi sebelumnya. Perubahan tahun dasar ini sekaligus sebagai upaya pemutakhiran paket komoditas dan diagram timbang. Pemutakhiran tersebut didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

Dari hasil pemutakhiran, komoditas-komoditas yang dipantau dalam penghitungan inflasi mengalami perubahan. Perubahan komoditas pantauan ini merupakan cerminan pola konsumsi yang terjadi di masyarakat saat ini, sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi. Beberapa komoditas lama dikeluarkan dari paket komoditas, karena sudah tidak dominan lagi dikonsumsi, seperti kalkulator, biaya

puskesmas, *Compact Disc* (CD) dan lain-lain. Terdapat juga komoditas baru yang ditambahkan ke dalam paket komoditas seperti tarif ojek *online*, *accessories* HP dan lain-lain.

Bobot konsumsi dari masing-masing komoditas terhadap nilai konsumsi secara total atau disebut diagram timbang, juga mengalami perubahan. Diagram timbang tersebut didasarkan pada seberapa besar rata-rata konsumsi di masyarakat untuk masing-masing komoditas. Komoditas dengan nilai konsumsi yang tinggi akan memiliki pengaruh yang tinggi pula terhadap inflasi yang terjadi ketika komoditas tersebut mengalami kenaikan harga.

Proses pemutakhiran diagram timbang ini erat kaitannya dengan metode yang digunakan dalam penghitungan inflasi. BPS menggunakan formula Laspeyres yang dimodifikasi untuk menghitung nilai Indeks Harga Konsumen atau inflasi. Formula tersebut menggunakan bobot atau penimbang berdasarkan tahun dasarnya. Penggunaan tahun dasar yang sama dalam jangka waktu yang terlalu lama akan berdampak pada akurasi nilai inflasi itu sendiri. Seperti halnya komoditas rokok yang lagi hangat diperbincangkan, bobot konsumsi rokok terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2018 akan mengalami pergeseran dibandingkan tahun 2012 yang lalu.

Data inflasi merupakan indikator penting dan ditunggu oleh banyak pihak dalam setiap rilisnya. Asumsi dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), penentuan tingkat suku bunga Bank Indonesia, dan

penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) menggunakan capaian inflasi sebagai salah satu variabelnya. Tidak hanya oleh pemerintah, kalangan dunia usaha juga menggunakan angka inflasi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di perusahaannya.

Pemutakhiran paket komoditas dan diagram timbang merupakan upaya BPS untuk terus melakukan penyempurnaan data inflasi. Penggunaan tahun dasar baru yaitu 2018, sebagai babak baru dalam penghitungan inflasi akan diberlakukan untuk sekitar lima tahun ke depan. Diharapkan dengan adanya pemutakhiran ini dapat lebih menyajikan informasi khususnya data inflasi yang lebih akurat sesuai dengan kondisi ekonomi di masyarakat saat ini.

Inflasi dan Daya Beli

Ani Saebani

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2019 sebesar 2,72 persen atau lebih rendah dibandingkan selama 2018 yaitu sebesar 3,07 persen. Tingkat inflasi tahun 2019 merupakan angka laju inflasi terkecil sepanjang 20 tahun. Namun demikian, inflasi rendah akan terjaganya tingkat harga sehingga masyarakat terjaga daya belinya. Atau sebaliknya sebagai petunjuk melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap daya beli masyarakat menurun?

Angka inflasi yang terkendali akan menjadi fundamental stabilitas ekonomi. Negara perlu adanya stabilitas ekonomi sebagai prasyarat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya menciptakan iklim ekonomi yang mampu meningkatkan gairah masyarakat untuk menabung dan mendorong kegiatan investasi. Inflasi juga akan meningkatkan gairah bagi para pengusaha untuk meningkatkan produksi baik barang dan jasanya sehingga akan tercipta daya saing dari barang impor.

Selama ini, tingkat inflasi yang tinggi sangat dihindari oleh pemerintah, sehingga pihak otoritas menggunakan sistem anti inflasi terhadap barang dan jasa. Pengendalian inflasi terhadap harga barang yang diatur pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif listrik salah satu cara efektif selama

tahun 2019. Bagaimana tidak, setiap kenaikan bensin khususnya premium dan tarif listrik mempunyai dampak luas terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga secara empiris setiap kenaikan harga barang yang diatur pemerintah akan menyulut inflasi yang tinggi.

Ketika inflasi rendah adalah sebuah hasil kinerja pengendalian harga-harga oleh pemerintah untuk menjaga supaya daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap terjaga. Akan tetapi, ketika pendapatan masyarakat yang turun sehingga akan mengakibatkan penawaran terhadap barang dan jasa yang turun. Fenomena tersebut bukan lagi sebagai indikasi adanya kesimbangan tapi sebaliknya adanya pertumbuhan ekonomi yang melambat. Karena kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian secara keseluruhan.

Virus Corona Membuat Pariwisata Lesu

Sarah Nurlaily

Statistisi BPS Kabupaten Bogor

Virus *corona* yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Kemunculan virus *corona* berawal dari sebuah pasar makanan laut Huanan di Kota Wuhan. Pasar tersebut memiliki luas 50.000 meter persegi, terkenal dengan jual beli bahan makanan dari hewan liar. Bahkan menyediakan ular, kelelawar, hingga musang, tentu saja selain ikan, kepiting, dan udang. Kemungkinan orang yang berinteraksi langsung di pasar hewan di Wuhan itu adalah yang pertama terjangkit penyakit tersebut.

Saat ini telah ditemukan sedikitnya 97.885 kasus positif terinfeksi virus *corona*, Sebanyak 3.348 orang diantaranya meninggal dunia dan 53.457 pasien dinyatakan sembuh. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dan bisa menyebabkan kematian, tetapi tidak sedikit juga yang dapat sembuh setelah terjangkit virus ini.

Kasus *corona* telah menyebar sedikitnya ke 93 negara di dunia, diantaranya China, Korea Selatan, Iran, Italia, Jerman, dan lain-lain. Mobilitas manusia yang tinggi menyebabkan virus menyebar dalam waktu singkat karena penularan virus ini terbilang mudah karena melalui udara.

Virus *corona* sukses menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Setelah penemuan dua korban WNI yang positif terpapar virus

corona, perlengkapan kesehatan seperti masker dan *hand sanitizier* langka di pasaran. Semua masyarakat berburu di berbagai apotek, toko obat, toko alat kesehatan, sampai toko *online*, hingga akhirnya harga barang tersebut tidak hanya mengalami kenaikan tetapi pindah harga. Masker yang sebelumnya berharga Rp. 35.000 per *box* (isi 50 *pcs*) menjadi Rp. 245.000 per *box*, bahkan di toko *online* mencapai Rp. 500.000 per *box*. *Hand sanitizier* yang sebelumnya Rp. 15.000 (55 ml) menjadi Rp. 45.000 - Rp. 80.000. Bahkan di beberapa tempat perbelanjaan, ramai dikunjungi konsumen, memborong bahan kebutuhan utamanya makanan.

Virus *corona* berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2020 tercatat menurun 7,62 persen dibanding Desember 2019 baik melalui pintu udara, laut, maupun darat. Sejalan dengan itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel kalsifikasi bintang ikut turun di angka 10,22 poin pada Januari 2020 dibanding Desember 2019, hampir di semua Provinsi di Indonesia.

Penurunan pada sektor pariwisata memberikan efek domino terhadap sektor lainnya. Sektor transportasi turut terkena imbasnya, baik perjalanan dalam negeri maupun mancanegara. Dari jalur udara, jumlah penumpang udara domestik mengalami penurunan 9,85 persen pada bulan Januari 2020 dibanding Desember 2019. Begitu pula dengan penumpang yang ke luar negeri/internasional mengalami penurunan 2,22 persen. Dari jalur laut, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri turun 4,10 persen pada Januari 2020 dibanding Desember 2019. Dari jalur darat, jumlah penumpang

kereta api Jawa dan Sumatera juga turut mengalami penurunan 8,89 persen.

Kekhawatiran akan tertularnya virus, membuat masyarakat enggan bepergian. Hal ini juga berdampak pada kelangsungan usaha bisnis *tour and travel*. Penutupan akses penerbangan di bandara China membuat tidak ada perjalanan dari dan ke China. Bandara Arab Saudi juga turut ditutup. Terjadi penundaan, bahkan pembatalan perjalanan wisata, bisnis, dan umroh membuat usaha ini kian merugi. Pemerintah memerintahkan maskapai untuk menurunkan tarif penerbangan ke beberapa destinasi wisata untuk mendongkrak kelesuan sektor pariwisata ini.

Tidak hanya memukul bisnis berskala besar, dampak virus *corona* juga mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Sektor penunjang pariwisata lainnya seperti penyedia makan minum, cenderamata, oleh-oleh juga terkena dampaknya. Padahal UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dalam menyerap tenaga kerja. UMKM harus dapat mencari kesempatan, peluang usaha baru karena tengah terjadi pembatasan impor, khususnya dari China yang selalu membanjiri pasar dalam negeri.

Bila wabah virus *corona* tidak segera usai, hal ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat merosot sejalan dengan keadaan di China dan dunia.

Anomali Inflasi di Masa Pandemi

Yana Hendriana

Statistisi BPS Kabupaten Bandung Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka inflasi April 2020 sebesar 0,08 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian inflasi bulan sebelumnya yaitu 0,10 persen. Melambatnya inflasi di bulan April yang bertepatan dengan masuknya bulan Ramadhan ini disebut oleh Kepala BPS Suhariyanto sebagai fenomena yang tidak biasa.

Kondisi perekonomian saat ini dihadapkan pada dua fenomena besar yaitu momen puasa Ramadhan dan terjadinya wabah pandemi global Covid-19. Secara historis angka inflasi pada saat bulan Ramadhan cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Mengacu pada data tahun lalu, inflasi pada awal Ramadhan yang terjadi di bulan Mei 2019 sebesar 0,68 persen. Ini merupakan inflasi bulanan tertinggi yang terjadi selama tahun 2019. Begitu pula yang terjadi pada setiap tahunnya, inflasi pada saat Ramadhan selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi yang terjadi pada bulan sebelum Ramadhan.

Tingginya inflasi pada saat puasa Ramadhan tidak lepas dari tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas khususnya komoditas bahan pokok. Peningkatan gairah ekonomi ini biasa terjadi karena adanya perilaku masyarakat yang ingin 'lebih' dalam menyajikan menu khususnya pada saat berbuka ataupun sahur. Disamping juga banyaknya kegiatan buka

bersama yang meningkatkan permintaan bahan makanan lebih tinggi dari biasanya. Faktor meningkatnya permintaan ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis masyarakat ketika menghadapi bulan puasa Ramadhan. Beberapa dari mereka selain menambah nilai yang biasa dibelanjakan sehari-hari, juga melakukan *panic buying* karena khawatir harga akan naik atau tidak kebagian bahan makanan yang diinginkan di pasaran.

Momen lainnya yang terjadi saat ini yaitu adanya wabah Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global. Pemerintah telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional. Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menetapkan tanggap darurat Covid-19 sampai dengan 29 Mei 2020. Kejadian bencana pada umumnya akan mendorong terjadinya inflasi. Sebagai contoh bencana tsunami yang terjadi di Palu akhir September 2018 silam, memicu inflasi Oktober 2018 di Kota Palu sebesar 2,27 persen. Hal ini dapat dipahami karena bencana biasanya menyebabkan suplai bahan kebutuhan pokok terhambat sehingga harga menjadi naik.

Lalu, mengapa kedua momen yang seharusnya menjadi pemicu inflasi justru tidak terjadi saat ini? Jawabannya tentu kita ketahui bersama bahwa bencana yang terjadi kali ini merupakan bencana yang tidak biasa. Wabah Covid-19 memaksa kita untuk mengurangi aktivitas ekonomi dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah diatur oleh pemerintah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Pembatasan ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian khususnya terhadap inflasi.

Komoditas-komoditas khas pemicu inflasi bulan Ramadhan tidak muncul dan memberikan andil yang tinggi terhadap inflasi kali ini. Hanya beberapa komoditas seperti emas perhiasan, bawang merah dan gula pasir yang biasa memicu inflasi di bulan Ramadhan masih tetap mengalami kenaikan harga. Komoditas-komoditas lainnya bahkan mengalami penurunan harga. Yang paling mencolok adalah tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara di setiap momen puasa atau lebaran selalu menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar) di beberapa wilayah dan larangan mudik menyebabkan komoditas ini mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Selain disebabkan karena adanya beberapa pembatasan, melambatnya inflasi April juga dimungkinkan karena adanya penurunan daya beli masyarakat akibat terhentinya sementara aktivitas ekonomi atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa berkurang. Hal ini terlihat juga dari 90 kota indeks harga konsumen (IHK), 51 kota diantaranya mengalami deflasi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan cerminan dari perekonomian yang cukup sehat. Hal itu pulalah yang mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi baik skala nasional maupun daerah. Tim ini bertugas menjaga kestabilan harga komoditas di masyarakat sehingga target inflasi yang ditetapkan dapat tercapai. Namun, inflasi yang rendah atau deflasi yang terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat merupakan preseden yang buruk

bagi perekonomian nasional. Inilah yang menjadi tantangan besar kita saat ini untuk menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin pada saat ini maupun di masa mendatang.

Pandemi ini memberikan dampak besar pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Diharapkan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat bagi masyarakat yang terdampak, dan bagi kita yang masih bisa membantu, inilah saat yang tepat di momen bulan puasa Ramadhan untuk membantu sesama. Selayaknya juga kita selalu berdo'a agar wabah ini bisa cepat berlalu, disamping juga tetap menaati berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus ini.

Menanti Lahirnya Petani Milenial

Gilang Abdul Aziz

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Sejak dahulu negara kita dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar rakyatnya berprofesi sebagai petani, dan sektor sektor pertanian masih memberi sumbangan besar terhadap laju perekonomian. Baik dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Setidaknya sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah sektor Industri Manufaktur.

Sektor pertanian juga merupakan sektor ekonomi yang paling tahan terhadap guncangan perekonomian global. Salah satu petunjuknya adalah saat terjadi Krisis Moneter tahun 1997 lalu, sektor pertanian mampu bertahan dan justru mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 menunjukkan secara nasional sektor pertanian tumbuh 0,22 persen padahal kondisi perekonomian bergerak minus 13,16 % dan inflasi sebesar 77,63%. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dari berbagai sektor, justru di sektor pertanian terjadi penyerapan tenaga kerja.

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor ekonomi yang strategis, antara lain dalam hal penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan bahan baku industri, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan petani dan

kesejahteraan masyarakat. Pertanian masih merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian Nasional, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini ditunjang dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia, serta kenyataan bahwa petani masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia.

Pada saat ini terjadi fenomena berkurangnya jumlah petani di Indonesia. BPS mencatat dalam rilis Sensus Pertanian 2013, menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia sebesar 12,05 %. Selain itu, saat ini juga terjadi *fenomena Aging Farmer's*, yaitu fenomena semakin menuanya usia petani di Indonesia, artinya jumlah petani yang masih ada saat ini didominasi oleh petani berusia diatas 50 tahun. Hal ini tentu berbahaya untuk keberlangsungan dunia pertanian Indonesia, karena dikhawatirkan tidak ada regenerasi petani dikalangan generasi milenial, walaupun ada, jumlahnya sedikit.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data Sensus Pertanian 2003–2013, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja pertanian didominasi tenaga kerja usia tua lebih dari 50 tahun, tenaga kerja usia muda jumlahnya tidak banyak dan cenderung merosot dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Demikian pula berdasarkan data Sensus Pertanian 1993–2003 komposisi pekerja sektor pertanian berdasarkan usia telah mengalami pergeseran yang menunjukkan semakin berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa selama dua dekade, secara absolut dan relatif, jumlah petani muda mengalami penurunan relatif tajam,

sementara yang tergolong usia tua semakin meningkat. Di sisi lain, pemuda yang bekerja di sektor non-pertanian juga meningkat dari waktu ke waktu.

Jumlah petani usia tua yang dominan dan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian yang merosot ternyata juga dialami oleh negara-negara lainnya, bukan hanya negara-negara di Asia yang memiliki keterbatasan lahan, namun juga di negara-negara Eropa dan Kanada.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di wilayah perdesaan petani umumnya adalah orang-orang desa yang berusia di atas 50 tahun, yang saat ini kebingungan memikirkan bagaimana keberlanjutan usaha tani mereka, karena nyaris tidak ada anak-anaknya yang mau meneruskan pekerjaan yang sudah mereka tekuni dan warisi dari generasi ke generasi. Ironisnya pula, sebagian besar orang tua di perdesaan juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja di desa sebagai petani sebagaimana pekerjaan mereka saat ini. Hasil kajian BI (2014) menyatakan hasil dari suatu survei di Cina, dari seluruh contoh survei, tidak ada satu pun orang tua sebagai petani yang mengharapkan anaknya menjadi petani seperti mereka. Ditambahkan pula tenaga kerja yang bermigrasi ke kota sebagian besar adalah pemuda, dan sekitar 84,5% belum pernah terlibat kegiatan di sektor pertanian, serta sekitar 93,6% berniat tinggal di kota.

Keberadaan jurusan Pertanian di beberapa perguruan tinggi pun belum banyak memberikan kontribusi dalam hal penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang terjun langsung sebagai petani. Walaupun demikian, dari sana telah menghadirkan berbagai kajian

akademis untuk melahirkan berbagai inovasi terkait tata cara budidaya maupun dalam hal melahirkan berbagai bibit unggul hasil penelitian maupun aneka suplemen obat nutrisi untuk menunjang produktivitas hasil pertanian.

Banyak alasan kenapa anak muda kurang meminati dunia pertanian, diantaranya; pertama, sektor pertanian belum memberikan prospek yang menjanjikan secara ekonomi, kedua, dunia pertanian cenderung dipandang kurang keren dimata anak muda karena masih kuatnya stigma kalau petani adalah pekerjaan ditempat yang kotor, kampungan dan tidak mempunyai prospek masa depan, Ketiga, terkait dengan ketersediaan modal terutama lahan. Menurut data BPS, 53,5% petani Indonesia termasuk kategori petani gurem. Petani gurem adalah **petani** yang memiliki atau menyewa lahan **pertanian** kurang dari 0,5 ha. Sehingga belum efisien secara ekonomi.

Ada beberapa langkah bagi pemangku kebijakan untuk mendorong minat generasi muda untuk terjun langsung menjadi petani;

1. Menyiapkan pusat inkubasi calon petani, sehingga anak muda memiliki ilmu dan keahlian dalam budidaya pertanian, maupun dalam mengelola usaha pertanian sehingga bernilai ekonomis.
2. Memfasilitasi bantuan permodalan dan pendampingan teknis, sehingga calon petani muda memiliki mentor yang mendampingi, mengawasi dan mengarahkan usaha tani yang cocok dengan faktor lingkungan sekitar.

3. Membantu menyediakan fasilitas pemasaran hasil pertanian, agar usaha taninya berjalan berkesinambungan.
4. Membantu program orang tua asuh dari korporasi besar untuk melakukan pembinaan secara lebih intensif kepada petani ataupun kelompok tani supaya lebih kuat secara manajemen maupun dibantu jaringan pemasarannya.

Pastinya masih banyak berbagai program untuk mendorong anak muda jadi petani milenial yang mempunyai semangat tinggi meneruskan usaha tradisi dan ikut merawat keutuhan NKRI dengan sumbangsih menjaga ketahanan nasional khususnya menjaga Ketahanan Pangan. Semoga semakin banyak anak muda tertarik menjadi petani milenial, yang tetep ulet, kreatif, produktif dan tetep gaul. Serta pandai memanfaatkan momentum dan fasilitas perkembangan dunia teknologi untuk menunjang usaha pertanian menjadi lebih maju.

Belajar dari Inflasi Ramadan yang tak Biasa

Muhamad Rikiansyah

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Kita baru saja melalui Ramadan dan Idul Fitri dengan kondisi tak biasa alias tidak normal. Hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat terimbas oleh pandemi Covid-19. Sosial dan ekonomi yang paling terpengaruh sehingga membuat tatanan kehidupan masyarakat berubah drastis. Di sektor ekonomi tentu saja banyak hal yang menjadi cerita selama 3 bulan pandemi ini menghantui. Salah satunya adalah adanya anomali inflasi khususnya di Ramadan dan Idul Fitri.

Inflasi Saat Ramadan

Menjadi catatan statistik bahwa Ramadan menjadi salah satu titik lonjakan inflasi di Indonesia setiap tahunnya. Kecenderungan masyarakat yang konsumtif menimbulkan dampak inflasi secara psikologis saat Ramadan.

Secara umum Terkait hari raya keagamaan, khususnya Ramadan biasanya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan inflasi, yaitu *Over Demand* (kelebihan permintaan), reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga, dan sikap produsen terhadap informasi kenaikan harga.

Dari ketiga faktor inilah muncul dampak psikologis terhadap inflasi. Sebelum Ramadan biasanya sektor industri sudah bersiap dengan meningkatkan

kapasitas produksi untuk stok barang saat Ramadan tiba. Sektor perdagangan pun demikian berusaha memperlancar arus distribusi barang sehingga siap untuk dibeli konsumen. Dan pemerintah juga berusaha menjaga agar pasokan terjaga sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Dengan demikian seharusnya tidak terjadi lonjakan inflasi tinggi saat ramadan. Tapi disinilah uniknya inflasi saat Ramadan. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Ramadan tahun lalu saja yang tepat sebulan di Mei 2019 sebesar 0,68 persen. Dan itu menjadi angka inflasi bulanan (*month to month*) tertinggi sepanjang 2019.

Faktor inflasi psikologis lah yang menjadi penyebab inflasi Ramadan cenderung tinggi. Ketika sebagian besar masyarakat berusaha menjaga kebutuhan pokok nya di Ramadan agar tidak sampai kurang, maka akan cenderung belanja secara berlebih (stok). Ini yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh produsen dan pedagang. Ketika terjadi kenaikan harga pun masyarakat biasanya akan tetap membeli nya selama Ramadan.

Efek Pandemi Terhadap Inflasi

Badan Pusat Statistik telah merilis angka inflasi nasional bulanan (*month to month*) Mei 2020 sebesar 0,07 persen. Dengan inflasi tahun kalender 2020 (*year to date*) sebesar 0,90 persen. Angka inflasi yang tergolong sangat rendah untuk periode Ramadan dan Idul Fitri. Angka inflasi Mei 2020 ini bisa menggambarkan banyak hal baik sisi positif ataupun negatif nya. Inflasi memang sejatinya menggambarkan geliat ekonomi suatu daerah. Banyak

faktor yang mempengaruhi inflasi. Faktor alam menjadi salah satu kendala dalam mengendalikan inflasi suatu komoditi. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor alam yang diluar dugaan dan tidak pernah diprediksi sebelumnya. Sehingga mau tidak mau inflasi April dan Mei 2020 sangat dipengaruhi oleh pandemi ini.

Rendah nya inflasi di April dan Mei 2020 bisa saja disebabkan penurunan daya beli masyarakat. Sebagaimana dikeluhkan pedagang di pasar karena pasar sepi pengunjung. Saat ini masyarakat di berbagai level sedang dalam kondisi terbatas secara penghasilan. Sehingga masyarakat berusaha menahan diri dari berbelanja yang tidak perlu. Sebagai contoh di sektor pariwisata juga sangat terpukul. Pariwisata sejatinya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi akibat pandemi ini, pariwisata menjadi sektor yang sangat terimbas. Dengan dibatasi nya akses transportasi menyebabkan sektor pariwisata mati suri. Tidak adanya wisatawan membuat aktifitas ekonomi menjadi lesu. Hotel-hotel banyak yang tutup sementara, dan hal ini berimbas kepada ketidakjelasan terhadap nasib ribuan tenaga kerja di sektor perhotelan. Serupa dengan hotel, nasib usaha rumah makan, restoran dan jasa usaha wisata lainnya pun sama. Dengan demikian rendah nya inflasi selama pandemi sangat dimungkinkan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, sehingga otomatis kehilangan penghasilan. Belum lagi akibat aktifitas ekonomi yang sangat dibatasi dengan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di hampir seluruh wilayah di Indonesia. PSBB menyebabkan

terbatasnya ruang gerak masyarakat di banyak sektor ekonomi. Contohnya mall dan pusat perdagangan yang terpaksa tutup. Ojek *online* yang tidak bisa menarik penumpang akibat keharusan *physical distancing*. Dan banyak lagi aktifitas ekonomi yang terdampak.

Tapi sisi positif rendahnya inflasi selama ramadan tahun ini juga bisa menjadi catatan. Bahwa dengan konsumsi yang terkendali menyebabkan harga juga lebih stabil. Hal ini membuat peluang spekulasi memainkan harga khususnya komoditi utama menjadi tertutup. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar ramadan tahun-tahun mendatang harus berusaha menahan konsumsi dengan belanja sewajarnya. Sehingga tidak akan ada lonjakan harga akibat inflasi psikologi yang dimainkan oleh spekulasi. Ketika *supply and demand* normal maka akan tercipta kestabilan harga. Dan tugas pemerintah menjadi lebih ringan untuk memantau harga dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Inflasi Alarm Kondisi Ekonomi

Pandemi ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah ataupun masyarakat. Ketika pandemi ini terjadi, semua kaget karena tidak ada sistem yang disiapkan sebelumnya. Penerapan PSBB selama 2 (dua) bulan lebih mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. PSBB yang tidak diimbangi penjaminan sosial untuk masyarakat sangat rentan pelanggaran, karena masyarakat perlu untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sehingga menjamin kebutuhan pokok masyarakat adalah hal yang paling utama.

Menjamin disini menyangkut ketersediaan bahan pokok masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk membelinya. Dengan terbatasnya pergerakan masyarakat tentu saja pekerja informal akan kesulitan mendapat penghasilan harian. Gejolak sosial rentan terjadi jika kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dipenuhi. Untuk itu perlu sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berbagi peran melakukan jaring pengaman sosial.

Diperlukan data akurat untuk membuat kebijakan yang tepat. Inflasi sebagai salah satu data indikator ekonomi perlu dicermati oleh semua pihak. Angka inflasi dihitung melihat relatif perubahan nilai konsumsi di masyarakat. Ketika terjadi inflasi atau deflasi yang tidak semestinya maka perlu menjadi perhatian terkait kondisi ekonomi di masyarakat. Angka inflasi bisa menjadi salah satu alarm awal yang menunjukkan se-normal apa "*suhu dan tekanan darah*" perekonomian masyarakat. Karena inflasi layaknya suhu tubuh dan tensi darah manusia yang harus dikendalikan besarannya bukan dihilangkan. Sehingga ketika inflasi terkendali dan normal maka menandakan keadaan ekonomi masyarakat secara umum bisa dikatakan aman.

Dengan digaungkan nya "*New Normal*" atau istilah lain nya adalah "*Adaptasi Kebiasaan Baru*" oleh pemerintah semoga saja menjadi geliat kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Tapi tentu harus diikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua penularan Covid-19. Hal ini bisa memperburuk kondisi bangsa Indonesia secara umum. Karena sebagai apapun kondisi

ekonomi, tidak ada artinya jika kesehatan dan keselamatan jiwa terancam.

<https://jabar.bps.go.id>

Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal yang Masuk ZEE Indonesia, Biar Jera!

Muhamad Sobari

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai suatu negara, sehingga dalam ZEE suatu negara berhak atas kekayaan alam di dalamnya, berhak menggunakan kebijakannya, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Zona inilah yang tidak diakui Tiongkok sehingga terdapat kapal-kapal ikan disertai *Coast Guard* milik negara tirai bambu tersebut di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Dikarenakan kegiatan ilegal dan juga pelanggaran kedaulatan negara inilah yang menyebabkan warganet yang dibuat geram hingga #NatunaBukanNacina menjadi *trending topic* dunia beberapa bulan yang lalu tetapi juga pemerintah Indonesia yang dibuat geram sampai-sampai Jokowi melakukan kunjungan langsung ke Pulau Natuna pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.

Kini perairan Natuna Utara kembali memanas. Mengutip dari CNBC Indonesia Tiongkok sedang melakukan pembangunan pulau-pulau buatan di perairan dekat dengan Indonesia dan Malaysia, pulau-pulau itu penuh dengan radar yang mampu mengawasi semua aktivitas yang terjadi di Laut China Selatan. Jika dulu Tiongkok tidak tahu suatu negara di sekitar Laut China Selatan mengebor, sekarang mereka tahu.

Dalam akun *Twitter* resmi Susi Pudjiastuti, Susi membagikan *link Youtube* acara webinar mengenai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Dalam acara *webinar* tersebut Susi memohon dengan kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam kepada Jokowi untuk mengatakan tidak terhadap IUUF dan menggerakkan segala instrumen pemerintah dibawah kepemimpinannya untuk mencegah kembalinya kapal-kapal asing karena Presiden Indonesia tidak mungkin tidak didengar oleh negara-negara lain.

Pemerintah Indonesia harus tegas dalam menghadapi setiap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok ataupun negara lain yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Indonesia harus tetap mengacu kepada kesepakatan Konvensi PBB tentang hukum laut/*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang mengakui hak perikanan tradisional untuk negara tetangga yang langsung berdampingan.

Untuk kasus masuknya kapal Tiongkok Ke ZEEI Laut Natuna Utara, Indonesia jangan sampai membuka ruang sedikitpun untuk bernegosiasi terkait *nine dash line* (9 garis putus-putus) yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Tiongkok. Jika Indonesia membuka ruang untuk bernegosiasi dan menjadikan persoalan ini menjadi persoalan bilateral dikhawatirkan posisi Indonesia akan mudah didikte Tiongkok, seperti halnya Malaysia yang pada akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain mengakomodasi kehadiran Tiongkok.

Anehnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, pernah dijadikan kambing hitam dalam pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Tiongkok, orang yang tidak lagi menjabat malah disalahkan, *Lho Kok Bisa?* Susi dinilai salah karena telah melarang aktivitas kapal nelayan dengan ukuran 150 *Gross Ton* (GT) yang dianggapnya menimbulkan kerusakan lingkungan. Akibatnya perairan Natuna Utara sepi aktivitas nelayan Indonesia sehingga kapal-kapal dari Tiongkok bebas memasuki ZEEI Laut Natuna Utara. Kebijakan Susi menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal yang menangkap ikan di ZEEI dinilai membuat para investor asing takut untuk melakukan investasi di Indonesia.

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 kapal pengawas milik KKP yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011 menangkap tiga kapal milik Vietnam di perairan Natuna. Ketiga kapal berbendera Vietnam tersebut terdiri dari satu kapal berukuran 125 GT dan dua kapal berukuran 98 GT. Melihat fakta ukuran ketiga kapal, ternyata untuk mencapai ZEEI Laut Natuna Vietnam tidak menggunakan kapal dengan ukuran 150 GT ke atas.

Logika sederhananya dari Vietnam saja masih dapat menggunakan kapal di bawah 150 GT apalagi bagi para nelayan Pulau Natuna menuju ZEEI Laut Natuna tentu saja tidak harus menggunakan kapal berukuran 150 GT ke atas. Dengan demikian, aturan Susi yang melarang penggunaan kapal diatas 150 GT bukanlah penyebab sepihnya aktivitas nelayan di ZEEI Laut Natuna karena sebenarnya masih dapat menggunakan kapal berukuran 98 GT atau 125 GT seperti yang digunakan Vietnam.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2009 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor perikanan sebesar 5,09 juta Dollar Amerika Serikat (USD), tahun 2010 USD 18,02 juta, tahun 2011 USD 9,99 juta, tahun 2012 USD 28,99 juta, tahun 2013 USD 10,00 juta, tahun 2014 USD 35,29 juta, tahun 2015 USD 53,10 juta, tahun 2016 USD 43,26 juta, tahun 2017 USD 59,33 juta, tahun 2018 USD 24,29 juta dan pada tahun 2019 realisasi PMA di sektor perikanan sebesar USD 42,33 juta.

Berdasarkan data selama satu dekade terakhir tahun 2015-2017 merupakan tahun dengan realisasi PMA di sektor perikanan paling tinggi. Periode 2015-2017 merupakan era Susi menjabat Menteri KKP. Jika dibandingkan dengan era sebelum susi yaitu tahun 2009-2013 era Susi realisasi PMA mengalami peningkatan sampai sepuluh kali lipat. Data tersebut membuktikan kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing ilegal yang mencuri ikan dari Indonesia tidak membuat investoar asing ketakutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi sub-sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Triwulan I Tahun 2010 s.d Triwulan III Tahun 2014 berfluktuasi disekitar 2,03 s.d 2,30 persen sedangkan dari Triwulan IV Tahun 2014 s.d Triwulan III Tahun 2019 berfluktuasi disekitar 2,42 s.d 2,70 persen. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat selama satu dekade terakhir ternyata selama periode masa jabatan Susi kontribusi perikanan terhadap PDB lebih tinggi daripada periode sebelum Susi.

Pernah diberitakan dalam media *online* selama periode Oktober-Desember 2019 KKP berhasil menangkap delapan kapal asing ilegal, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Oktober-Desember 2018 yang hanya mampu menangkap tiga kapal saja. Kemungkinannya ada dua, yang pertama kinerja pemberantasan pencurian ikan yang dilakukan kapal asing selama Oktober-Desember 2018 memang lebih rendah dan yang kedua selama Oktober-Desember 2019 keberanian kapal asing mencuri ikan dari Indonesia muncul kembali.

Data dari KKP selama Susi menjabat sepanjang Oktober 2014 hingga Oktober 2019 sudah 530 kapal asing ilegal yang dimusnahkan. Berdasarkan data 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, 3 kapal Tiongkok, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Nigeria dan 1 kapal berbendera Belize.

Dari data di atas sepertinya Tiongkok ketika Susi menjabat sangat berhati-hati untuk memasuki ZEEI karena hanya 3 kapal yang berbendera Tiongkok. Baru saja sembilan bulan Susi tidak lagi menjabat Menteri KKP Tiongkok kembali berani memasuki ZEEI Laut Natuna Utara pada akhir tahun 2019 lalu dan bahkan ketika wabah Covid-19 sedang melanda, Tiongkok malah meningkatkan kekuatan militernya di Laut China Selatan.

Terakhir konflik Indonesia dengan Tiongkok di Natuna pada Maret 2016. Pada saat itu, *Coast Guard* Tiongkok secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078 sehingga KP Hiu 11 sulit menangkap kapal ikan ilegal asal Tiongkok KM Kway Fey 10078. Mungkin, memang seharusnya ditenggelamkan saja kapal-kapal asing ilegal

yang memasuki ZEEI, *biar Jera!* Terbukti dari data diatas jika kebijakannya langsung ditenggelamkan maka Tiongkok atau negara lain akan berfikir berkali-kali sebelum memasuki ZEEI.

<https://jabar.bps.go.id>

Ekonomi di Tahun Pandemi Covid-19

Ani Saebani

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Di tengah gejolak ekonomi global yang tak menentu akibat pandemi Covid-19 yang menyerang semua negara di dunia. Kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) di beberapa negara maupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan Indonesia dalam menekan dan pengendalian penyebaran virus *corona*. Akibat pandemi Covid-19 yaitu meningkatkan pengangguran, bertambahnya penduduk miskin, daya beli yang menurun sampai pada penurunan laju ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I/2020 sebesar 2,97 persen. Angka tersebut mengalami perlambatan dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2019 sebesar 5,07 persen.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II/2020? Ini menarik untuk dianalisis apakah laju ekonomi Indonesia bisa mempertahankan seperti halnya di kuartal I/2020 ataukah justru terkoreksi lebih dalam lagi. Beberapa pengamat memprediksi laju ekonomi Indonesia bisa terkoreksi lebih dalam lagi sampai minus 4,8 persen bahkan sampai minus 7 persen.

Melihat perkembangan ekonomi Indonesia kuartal I/2020 lebih baik jika dibandingkan dengan laju ekonomi Indonesia di masa krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi yang didahului krisis moneter dan krisis

kepercayaan terhadap pemerintah, ekonomi Indonesia terkoreksi cukup dalam sampai angka minus 13,13 persen.

Begitu pun dengan ekonomi dunia, jika pada Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 persen, maka pada April 2020 pertumbuhan ekonomi diprediksi menurun sampai minus 3 persen. Prediksi ini disertai asumsi persebaran Covid-19 memuncak pada kuartal kedua dan menurun pada semester 2 tahun ini.

Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi global tersebut, IMF menyebut perekonomian 2020 menjadi yang terburuk setelah *great depression* pada tahun 1930-an juga lebih buruk dari krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009.

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,3 persen. Prediksi laju ekonomi BI lebih tinggi dari prediksi IMF yang tertera pada laporan *World Economic Outlook 2020*, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0,5 persen.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 akan terkoreksi diantaranya karena pendapatan masyarakat yang menurun. Covid-19 mengakibatkan dunia usaha menjadi lesu sehingga pendapatan masyarakat terus mengalami penurunan. Di lain pihak pos untuk pengeluaran masyarakat semakin meningkat, mulai dari pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi, kesehatan maupun paket data dan pulsa, dan pendidikan di ajaran baru tahun ini.

Beberapa indikator yang menjadikan perekonomian Indonesia terkoreksi diantaranya masih menurunnya pertumbuhan sektor industri, sektor pariwisata, perdagangan baik ritail maupun besar, transportasi serta pergudangan. Juga akibat menurunnya ekspor impor akibat adanya penurunan ekonomi dunia.

Penguatan Ekonomi Domestik

Dalam menjaga ekonomi dari keterpurukan dan tetap tumbuh maka pemerintah Indonesia menerapkan tatanan baru (*new normal*). Dalam tatanan baru ini, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus *corona* Covid-19.

Untuk merealisasikan skenario *new normal*, dimana pemerintah telah menggandeng seluruh pihak termasuk para ahli kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi untuk merumuskan protokol atau SOP dalam memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali untuk berusaha dan bekerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas di tengah pandemi Covid-19.

Dilihat dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun, komponen konsumsi rumah tangga menjadi faktor dominan yang memberikan pertumbuhan dalam perekonomian. Potensi penguatan konsumsi rumah tangga perlu dipertahankan supaya dapat meningkatkan laju ekonomi yang positif.

Dalam mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi, pengeluaran pemerintah terhadap bantuan sosial perlu ditingkatkan khususnya yang

menyasar rumah tangga berpendapatan rendah. Berbagai bantuan sosial seperti BOS, BPJS penduduk miskin, PKH maupun bantuan pangan nontunai (BPNT) perlu dipertahankan sampai akhir tahun 2020.

Mempertahankan ekonomi perdesaan menjadi salah satu strategi meningkatkan laju ekonomi Indonesia. Transfer Dana Desa yang dijadwalkan pada awal tahun perlu segera digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. Program bantuan sosial Dana Desa pun mengalir dan perlu dipertahankan untuk membantu masyarakat kurang mampu di perdesaan.

Menjaga pertumbuhan dari investasi mejadi kunci supaya dapat menggerakkan roda perekonomian lebih tinggi. Daya ungkit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dampak investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga.

Indonesia perlu lebih ekspansif dalam menjaring investasi supaya pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Minat investor untuk berinvestasi sangat dipengaruhi bagaimana suatu negara dapat memberikan jaminan bahwa investor akan diuntungkan. Selain kondisi politik dan keamanan yang stabil, peraturan atau regulasi harus lebih mudah dalam perizinan, dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 perlu menyasar pelaku ekonomi kecil menengah

(UMKM). Banyak pelaku UMKM yang gulung tikar dan perlu modal usaha untuk membuka kembali usahanya. Untuk itu peranan pemerintah melalui program KUR dan pemberian kredit modal perlu difokuskan sehingga dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Yang terakhir tentunya, pemerintah selain peningkatan infrastruktur fisik yang semakin baik. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan baik dengan pendidikan yang berorientasi dengan kemajuan teknologi. Pemerataan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian SDM supaya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Produktivitas kerja meningkat, penghasilan juga bertambah, maka pengeluaran terhadap konsumsi rumah tangga juga akan semakin baik. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik ditengah gejolak wabah virus *corona* yang dapat terkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mengulik Deflasi Kota Bandung

Vira Wahyuningrum

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung mengalami deflasi pada Juli 2020. Sebanyak 6 dari 7 kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Barat mengalami deflasi. Deflasi atau sering disebut juga sebagai disinflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Pada kondisi deflasi, tingkat harga barang maupun jasa secara umum mengalami penurunan.

Secara rutin setiap awal bulan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan IHK/inflasi. Di Jawa Barat, perkembangan IHK dihitung di 7 kota yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok dan Tasikmalaya. Awal Agustus ini dirilis perkembangan IHK kondisi Juli dimana terjadi deflasi pada gabungan 7 kota IHK Jawa Barat. Kota Bandung yang merupakan ibukota provinsi mengalami deflasi sebesar 0,14 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan gabungan 7 kota IHK Jawa Barat yang mengalami deflasi 0,07 persen. Berdasarkan series data bulanan, selama Januari-Juli 2020 Kota Bandung selalu mengalami deflasi, kecuali pada bulan Juni.

Penghitungan IHK/inflasi dilakukan pada 11 kelompok pengeluaran yang mencakup perkembangan harga berbagai barang dan jasa. Kelompok pengeluaran tersebut meliputi Makanan, Minuman dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan;

Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Pendidikan; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sebelas kelompok pengeluaran ini terbagi menjadi 43 subkelompok yang mencakup berbagai komoditas barang maupun jasa.

Apa saja komoditas yang mengalami deflasi pada Juli 2020? Menurut kelompok pengeluaran, hanya kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau saja yang mengalami deflasi. Deflasi kelompok pengeluaran ini sebesar 0,81 persen dengan andil deflasi Kota Bandung sebesar 0,22 persen. Subkelompok makanan menjadi penyumbang andil deflasi terbesar Kota Bandung. Komoditas penyebab deflasi terbesar pada subkelompok makanan adalah Bawang Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Putih, dan Cabai Merah. Andil deflasi komoditas Bawang Merah dan Daging Ayam ras masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,12 persen. Komoditas Bawang Putih memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen dan Cabai Merah sebesar 0,02 persen. Sebaliknya komoditas yang mengalami inflasi pada subkelompok makanan adalah Telur Ayam Ras dengan andil sebesar 0,06 persen. Pada bulan sebelumnya, komoditas Telur Ayam Ras juga termasuk 3 besar komoditas dengan andil inflasi tertinggi.

Sementara itu, 10 kelompok pengeluaran lainnya secara umum mengalami inflasi namun tidak terlalu tinggi. Inflasi yang paling dominan terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,06 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menjadi penahan deflasi selain Telur Ayam Ras adalah Emas Perhiasan. Andil inflasi Emas Perhiasan di Kota Bandung sebesar 0,05 persen. Tarif parkir pada kelompok

pengeluaran Transportasi juga menyumbang inflasi sebesar 0,01 persen. Pada subkelompok pengeluaran lainnya, inflasi lebih lemah dibandingkan penurunan harga pada komoditas subkelompok makanan.

Deflasi komoditas barang dan jasa umumnya akan menyebabkan pergeseran pola pengeluaran masyarakat. Dalam jangka panjang, konsumsi dan pengeluaran masyarakat akan lambat laun menurun. Deflasi yang terus menerus juga mempengaruhi siklus perekonomian dari sisi produsen, investor maupun lembaga keuangan. Ditambah lagi situasi pandemi Covid-19 saat ini yang sangat berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. Diperlukan pengendalian deflasi dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat untuk mencegah terjadinya permasalahan ekonomi yang berkelanjutan.

Basis Data UMKM

Isti Larasati Widiastuty

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32 persen. Setelah kuartal pertama pertumbuhan ekonomi melambat di level 2,97 persen. Hanya dalam waktu tiga bulan saja, ekonomi Indonesia langsung terperosok cukup dalam.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Tak hanya aspek ekonomi yang terganggu, pandemi ini telah memengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Padahal, masih pada kuartal yang sama Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai bagian dari negara dengan pendapatan menengah atas. Di tengah pandemi Covid-19, lembaga internasional ini menyematkan predikat kinerja perekonomian Indonesia di 2019 naik kelas. Naik dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Label ini diberikan karena pada 2019 Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia mencapai 4.050 dollar AS. Sedikit di atas batas bawah PNB per kapita kelompok menengah atas sebesar 4.046 dollar AS.

Terdapat empat klasifikasi yang ditetapkan Bank Dunia berdasarkan pendapatan per kapita negara. Negara berpendapatan rendah jika memiliki PNB per kapita di bawah 1.035 dollar AS, menengah ke bawah antara 1.036 -

4.045 dollar AS, menengah atas antara 4.046 - 12.535 dollar AS, dan berpenghasilan tinggi di atas 12.536 dollar AS.

Bukan tidak mungkin, dengan PNB per kapita sedikit di atas ambang bawah kelompok pendapatan menengah atas, Indonesia akan turun kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Ini tentunya adalah posisi rentan yang berisiko bagi Indonesia. Covid-19 “sangat mampu” membawa Indonesia kembali turun kelas.

Faktanya, dalam satu semester di 2020 ini, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level minus 1,26 persen. Perlu upaya keras dari seluruh pihak agar di semester berikutnya ekonomi Indonesia mampu keluar dari kontraksi pertumbuhan.

Hanya kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mampu tumbuh positif lebih tinggi pada kuartal II 2020 dibandingkan kuartal II 2019. Di tengah kategori lapangan usaha lainnya yang tumbuh melambat bahkan negatif.

Sejak pandemi melanda Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, yang diikuti dengan ditetapkannya kebijakan “*bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah*” aktivitas penggunaan jasa informasi dan komunikasi meningkat pesat. Masyarakat “dipaksa” mengakses internet lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Di tengah pandemi ini, Informasi dan Komunikasi tumbuh fantastis mencapai 10,88 persen pada kuartal kedua 2020 (*year on year*).

Di sisi lain, sebagai penopang tertinggi ekonomi Indonesia, industri pengolahan merupakan sektor yang terdampak signifikan akibat Covid-19. Penurunan

aktivitas produksi telah mulai terasa sejak awal tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 berbagai negara melakukan pembatasan aktivitas pergerakan penduduk, termasuk perdagangan antar wilayah. Implikasinya permintaan mengalami penurunan.

Periode Januari – Juni 2020, total ekspor Indonesia minus 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pun demikian dengan total impor, yang berkontraksi hingga 14,28 persen *year on year* pada semester II 2020. Padahal, lebih dari 70 persen barang impor yang masuk ke Indonesia adalah golongan bahan baku/penolong. Hambatan ini tentunya memberikan dampak signifikan bagi aktivitas usaha di Indonesia, khususnya industri manufaktur.

Covid-19 ternyata telah cukup dalam mengganggu kondisi ekonomi nasional. Strategi dan kebijakan pun terus bergerak menyesuaikan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diubah menjadi Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Perpres Nomor 82 tahun 2020. Tak hanya pandemi yang harus ditangani, ekonomi nasional pun “butuh” perhatian lebih.

Basis Data UMKM

Pemulihan ekonomi nasional kiranya sangat strategis dalam memperbaiki fondasi perekonomian nasional. Covid-19 menjadi momentum untuk perubahan struktural ekonomi negeri ini. Kiranya sudah saatnya kita “kembali” memperkuat sektor usaha yang produktif, “tidak mengandalkan” bahan baku impor, serta padat

karya. Menjadi pelajaran bersama ketika industri ditopang oleh bahan baku impor, maka guncangan global secara signifikan berdampak pada perekonomian bangsa.

Perkuat UMKM. Walau guncangan Covid-19 juga menerpa UMKM Indonesia, namun kelompok ini relatif lebih mampu mempertahankan usahanya. Setidaknya, golongan ini akan berupaya “mencari usaha lain” untuk bertahan hidup.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria : memiliki omset tahunan kurang dari 2,5 miliar rupiah atau memiliki kekayaan bersih kurang dari sepuluh miliar rupiah. Kementerian Koperasi dan UKM melansir lebih dari 99 persen usaha di Indonesia berskala UMKM.

Kementerian ini juga menyampaikan pangsa UMKM terhadap PDB Indonesia di tahun 2018 mencapai lebih dari 61 persen. Mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 116 juta orang (97 persen dari total tenaga kerja). Melihat kekuatan strategis ini, penguatan UMKM urgen dilakukan sebagai strategi efektif memulihkan ekonomi nasional.

Bagaimana? Kementerian KUKM dalam Rencana Kerja Tahun 2020 memiliki tiga pilar utama dalam pengembangan UKM di Indonesia. Yakni meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM, membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM, dan koordinasi lintas sektor.

Namun, hal mendasar untuk memperkuat UMKM adalah keberadaan data UMKM yang merupakan suatu keniscayaan. Seluruh pemangku kepentingan perlu “menyadari” akan pentingnya data sebaran UMKM hingga level wilayah terkecil.

Perlu penyiapan peta sebaran UMKM menurut berbagai karakteristiknya pada level wilayah terkecil pengambilan kebijakan. Jika upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing UMKM, maka data adalah “hal penting”.

Penguatan daya saing UMKM dimulai dari penguatan data. Jadikan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkrit. Ajak dan dorong setiap pelaku usaha untuk mencatatkan dirinya dalam pembangunan basis data UMKM. Pastikan setiap pelaku usaha berpartisipasi. *Stakeholders* pengampu kebijakan melakukan verifikasi dan validasi. Semua bergerak, bersinergi membangun basis data UMKM, kunci utama pemetaan strategi efektif daya saing UMKM.

Segera benahi basis data UMKM. Lelas perkuat UMKM, di tengah awan resesi yang semakin menggelayut.

Peran Pertanian dalam Menghindar dari Krisis Ekonomi di Kabupaten Kuningan

Asep Hermansyah

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

BPS Kabupaten Kuningan

Peran kategori pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuningan sejak tahun 2010 sd 2019 menempati kategori juara dari keseluruhan 17 kategori perekonomian.

Rentang peran kategori pertanian selama masa tersebut selalu berada di atas 23 persen dari total PDRB Kabupaten Kuningan. (Publikasi PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan)

Masa berganti dan tahun pun berubah, terutama sejak adanya pandemik Covid 19 mendera dan mengancam pertumbuhan perekonomian hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan sangat mungkin berpengaruh pada perekonomian dunia.

Adapun gambaran dari tentang konsep resesi dan depresi perekonomian ada pada link <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5121402/resesi-krisis-dan-depresi-ekonomi-apa-bedanya>.

Adapun penjelasan konsep krisis dan depresi ekonomi adalah sebagai berikut;

Krisis ekonomi biasanya mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, angka

pengangguran naik, pemerintah kesulitan membiayai belanja, dan harga kebutuhan naik tajam.

Sedangkan depresi ekonomi, sebenarnya tidak ada definisi standar tentang perbedaan antara resesi dengan depresi. Tapi, depresi ekonomi biasanya lebih parah dalam hal besarnya dan lamanya kontraksi ekonomi.

Sementara itu mengutip Fortune, terdapat perbedaan yang jelas dalam penurunan PDB dan jangka waktu krisis antara resesi dengan depresi. Dalam resesi, penurunan PDB berada di kisaran -0,3% hingga -5,1%.

Di Amerika Serikat (AS) contohnya, penurunan PDB paling parah (-5,1%) terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu yaitu pada Desember 2007-Juni 2009.

Sedangkan dalam istilah depresi, penurunan PDB berada di kisaran -14,7% hingga -38,1%. Penurunan PDB terburuk di AS (-38,1%) terjadi pada Januari 1920- Januari 1921. Untuk penurunan PDB paling rendah berada di -14,7% terjadi pada Januari 1910-Januari 1912.

Secara sekilas, nampak bila penurunan PDB pada depresi ekonomi jauh lebih buruk daripada resesi.

Selain perbedaan besar penurunan PDB, jangka waktu krisis juga menentukan perbedaan antara resesi dengan depresi. Pada resesi, jangka waktu atau lamanya krisis berlangsung selama 6-18 bulan.

Sedangkan untuk depresi, lamanya krisis berlangsung antara 18-43 bulan. Dengan kata lain, depresi ekonomi merupakan kondisi yang jauh lebih parah dari resesi.

Potensi Menghindar dari Krisis Ekonomi

Melanjutkan kondisi krisis yang mungkin terjadi di Kabupaten Kuningan, maka akan dilihat terlebih dahulu terhadap peran distribusi PDRB di kategori pertanian dan perdagangan selama 10 tahun terakhir.

Gambaran awal tulisan ini bahwa pertanian memiliki peran dalam PDRB yang lebih besar dari 23 persen selama 10 tahun terakhir dan perdagangan yang 10 tahun terakhir memiliki peran di atas 14 persen, maka kondisi krisis dapat saja dihindari dengan perlakuan kebijakan pembangunan perekonomian di dalam 2 kategori utama tersebut.

Pandemi Covid-19, efeknya terhadap berbagai sektor perekonomian akan sangat bervariasi. Analisis *SDGs Center UNPAD*, misalnya memprediksikan salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata.

Pembatasan sosial karena krisis pandemi Korona baru mulai di bulan April 2020 pun belum dimasukkan sebagai dampak yang harus diperhitungkan. Dampak cukup masif akan terjadi khususnya pada sektor manufaktur dan industri secara umum apabila pembatasan sosial akan dilakukan terutama di kota-kota dengan basis industri manufaktur.

Analisis pemodelan ekonomi UNPAD tersebut juga memproyeksikan sektor manufaktur dan industri akan terkena imbas yang juga parah. Demikian juga daerah-daerah basis industri tersebut seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Analisis ini juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan.

Relatif resilient-nya sektor pertanian juga dikonfirmasi oleh proyeksi dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) untuk perekonomian Indonesia edisi bulan April lalu. Ketika sebagai dampak dari pandemi Covid-19, EIU merevisi pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 3.0% menjadi -1.5% (terkoreksi -4.5%) dan sektor jasa sebesar 7.2% menjadi 2.4% (terkoreksi -4.8%), pertumbuhan sektor pertanian hanya direvisi dari 4.1% menjadi 3.2% (-0.9%). Analisis pemodelan SDGs Center UNPAD, memberikan hasil yang senada. (Arief Anshory Yusuf & Friends, 2020)

Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan.

Nampaknya peran sektor pertanian sebagai sektor penyangga (*buffer sector*) di masa krisis akan terulang di tahun ini.

Selain imbas restriksi sosial yang dampaknya relatif kecil karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena sifat barang-

barang pertanian tanaman pangan yang elastisitas permintaannya rendah.

Ketika ekonomi mengalami periode *booming*, permintaannya tidak akan meningkat pesat, demikian pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun drastis.

Aktivitas-aktivitas perekonomian yang esensial dan rendah resiko pelakunya terpapar virus harus mendapatkan perhatian lebih agar serius diberikan sentuhan kebijakan khusus. Dari berbagai aspek yang akan dibahas berikut, sektor pertanian adalah salah satu kandidat terkuat.

Pertama, dari sudut pandang urgensi, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (*food security*) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Agar Ketika pandemi ini berakhir tidak menimbulkan masalah baru tentang stunting dan malnutrition.

Urgensi menjadikan pertanian sebagai kategori perekonomian yang harus mendapatkan perhatian serius adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam.

Tahun ini pun diramalkan akan ada kekeringan yang lebih parah dibandingkan biasanya. Ini menambah resiko/kemungkinan ambruknya sektor pertanian di luar dampak pandemi Covid-19. Semua ini berdampak pada

relevansi dan urgensi sektor pertanian untuk mendapat perhatian lebih dalam penanganan krisis.

Kedua, krisis membuka jendela kesempatan (*window of opportunity*) untuk merevitalisasi sektor pertanian. Kondisi tertutupan penuh dari perdagangan internasional (*complete autarky*), akan menguji keras sistem produksi pertanian Indonesia, dan membantu kita mengidentifikasi titik-titik lemah untuk diperbaiki dalam konteks jangka panjang.

Seperti yang disebutkan di atas, selain sebagai bagian penting dari sistem penyediaan pangan, di saat krisis ternyata sektor pertanian bisa menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*) alamiah.

Sektor pertanian, di kala normalpun, masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka ruang fleksibilitas bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi sosial (PSBB) ini, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan publik, menjadi hal yang masuk akal. Akan tetapi, fleksibilitas ini memerlukan catatan-catatan sebagai berikut.

Pertama, tetap dengan memperhatikan besar kecilnya resiko terpaparnya virus Korona pada pekerja dan pelaku usaha di sektor pertanian dan di pedesaan tentunya sangat tidak bisa diabaikan begitu saja.

Betul bahwa dalam proses produksinya, sektor pertanian jelas tidak seperti sektor lain, konsentrasi proses produksi dilakukan di luar ruangan, dalam lahan yang

relatif lebih/sangat luas, dan di area berkepadatan dari pekerja pertanian relatif rendah.

Kedua, integrasi dengan kategori perekonomian pendukung pertanian ke dalam perlakuan khusus juga seperti transportasi dan perdagangan.

Ketiga, relaksasi atau fleksibilitas aktivitas kategori pertanian di masa pandemi Covid-19 tidak akan banyak memberikan manfaat untuk terciptanya ketahanan pangan di masa pandemik jika dirupsi permintaannya (demand) tidak juga diatasi secara simultan.

Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Ketersediaan benih dan pupuk yang cukup, terpeliharanya jaringan pengairan ke lahan pertanian dan kredit perusahaan produk-produk pertanian serta jaminan pemasaran dengan berkoordinasi dengan pelaku perdagangan hasil pertanian.

Kedua, pemerintah di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. Sehingga hasil pertanian dapat tersalurkan ke kantong-kantong konsumsi hasil pertanian potensial.

Ketiga, aktivitas sektor pertanian terutama sektor pertanian tanaman pangan harus diberi ruang untuk tetap aktif berproduksi, dengan pembatasan tertentu, di masa restriksi sosial (PSBB) dengan mempertahankan protokol perlindungan kesehatan standar Covid-19.

Keempat, rekomendasi untuk akademisi, pengamat atau peneliti sektor pertanian. Ini saat yang tepat untuk

mengkaji dan meneliti kelemahan-kelemahan sektor pertanian di daerah.

Apabila ke-empat rekomendasi tersebut secara simultan dilakukan oleh pelaku usaha dan pekerja pertanian serta mendapatkan dukungan pemerintah daerah maka kekhawatiran akan terjadinya krisis perekonomian akan dapat diminimalisir.

Empat rekomendasi tersebut diyakini mampu membuat pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut tidak akan ambruk ke titik negatif.

Khusus Kabupaten Kuningan yang didominasi pertaniannya cukup besar maka kenaikan pendapatan dari usaha pertanian jelas akan memberikan efek yang membuat perekonomian terhindar dari krisis ekonomi, hal ini disebabkan :

1. Pertanian adalah kategori yang memiliki tenaga kerja dengan proporsi terbesar.
2. Luas wilayah pertanian yang cukup luas.
3. Produksi pertanian, terutama pertanian tanaman pangan memiliki produktifitas yang baik.

Apabila pembangunan perekonomian kategori pertanian mampu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik maka

1. Perekonomian terhindar dari krisis ekonomi.
2. Terhindar dari pengangguran yang tinggi persentasenya.
3. Meredam peningkatan kemiskinan akibat dampak Covid 19.

Hunian Hotel pada Masa Pandemi

Vira Wahyuningrum

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar pada seluruh sektor ekonomi, tak terkecuali bisnis jasa akomodasi (hotel). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penyebaran virus *corona* berimbas pada penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel. Tidak sedikit hotel dan usaha akomodasi lainnya terpaksa gulung tikar maupun sementara tidak beroperasi akibat situasi pandemi.

Usaha jasa akomodasi dan transportasi merupakan pendukung sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Program pembangunan pariwisata Jawa Barat sedang gencar dilakukan. Namun, penyebaran virus *corona* awal tahun ini menyebabkan sektor pariwisata terdampak sangat signifikan. Pertumbuhan hunian hotel dan transportasi sebagai penyokong pariwisata mengalami kemerosotan yang tajam sejak pandemi merebak.

Secara otomatis, PSBB membatasi seluruh aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jangankan untuk berwisata, aktivitas kebutuhan primer pun serba terbatas. Selain anjuran pemerintah, masyarakat juga berinisiatif mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus. Tempat rekreasi dan transportasi

terpaksa mandeg beroperasi. Tentunya ini berdampak pada keberlangsungan usaha akomodasi.

Sebagai gambaran, usaha akomodasi di Jawa Barat secara nasional cukup menonjol. Data statistik tahun 2019 menunjukkan jumlah usaha akomodasi di Jawa Barat mencapai 3.191 usaha (Statistik Indonesia 2020, BPS). Dibandingkan provinsi lain, jumlah usaha akomodasi di Jawa Barat menempati urutan ketiga terbanyak setelah Bali dan Jawa Timur.

Dari total usaha akomodasi di Jawa Barat, sebesar 15,51 persennya merupakan hotel berbintang dan sisanya hotel non bintang. Klasifikasi hotel non bintang mencakup hotel, vila, pondok wisata, penginapan remaja, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Sebaran hotel di Jawa Barat terbanyak di Kota Bandung sebagai destinasi wisata dan kuliner. Di posisi berikutnya Kabupaten Pangandaran, Garut dan Bogor juga termasuk daerah dengan jumlah usaha jasa akomodasi terbanyak. Daerah potensi wisata menarik investor membuka peluang bisnis penyediaan akomodasi bagi wisatawan. Daya tarik wisata secara tidak langsung akan meningkatkan TPK dalam bisnis jasa akomodasi.

TPK merupakan indikator produktivitas usaha akomodasi/hotel. Indikator ini dihitung dengan membandingkan banyaknya malam kamar terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia pada periode tertentu dalam satuan persen (sirusa.bps.go.id). BPS merilis perkembangan TPK secara rutin berdasarkan hasil Survei Usaha/Perusahaan Jasa Akomodasi yang

dilakukan bulanan mencakup hotel bintang maupun non bintang.

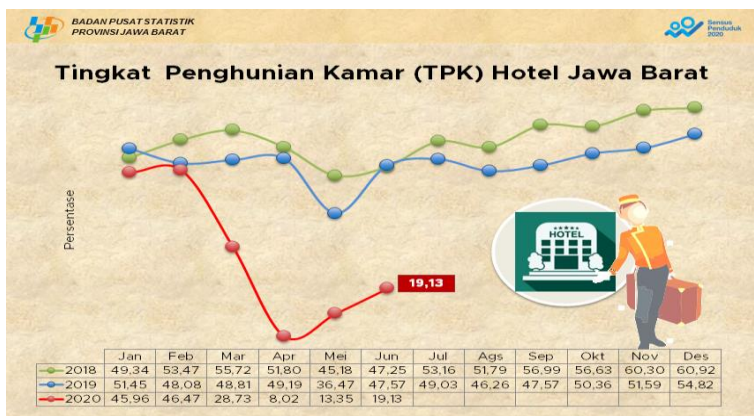
Pada awal tahun 2020 TPK hotel di Jawa Barat masih terbilang normal, meskipun persentasenya di bawah TPK tahun sebelumnya. Memasuki bulan Maret, dibandingkan bulan sebelumnya, TPK hotel turun drastis dari 46,47 persen menjadi 28,73 persen. Penurunan ini belum seberapa dibandingkan TPK bulan April, yang terjun hingga 20,71 poin di angka 8,02 persen. Hal ini dikarenakan pada dua minggu pertama di bulan Maret aktivitas usaha perhotelan masih berlangsung seperti biasa. Sementara pada April, pemberlakuan PSBB secara penuh baik level Jawa Barat maupun sebagian wilayah semakin mempengaruhi anjloknya TPK hotel. Tamu asing atau wisatawan mancanegara pun pada masa pandemi ini sama sekali tidak ada, karena akses masuk melalui transportasi internasional sementara ditutup.

Mei dan Juni 2020, TPK hotel di Jawa Barat mulai beranjak naik. Pelonggaran PSBB di beberapa zona aman Covid-19 sedikit mendongkrak TPK hotel di Jawa Barat. TPK hotel pada Mei mengalami kenaikan 5,33 poin dibandingkan April. Demikian pula pada Juni, dibandingkan bulan sebelumnya TPK hotel naik 5,78 poin menjadi sebesar 19,13 persen. Meskipun masih sangat jauh dibandingkan capaian TPK pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, setidaknya tren perkembangannya mulai menunjukkan kenaikan.

Beberapa kelompok masyarakat mulai memanfaatkan kesempatan untuk melepas penat dengan hiburan dan rekreasi. Setelah kurang lebih tiga bulan

dalam masa pandemi ‘terpaksa’ lebih banyak di rumah dan minim mobilitas, pelanggaran PSBB terasa bagi ‘angin segar’. Namun, tentunya hal ini dilakukan dengan mengindahkan himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada awal Juni, aktivitas usaha, perkantoran dan transportasi juga mulai beroperasi kembali. Perlahan kegiatan ekonomi masyarakat yang sempat terhenti mulai menunjukkan pergerakan.

Tak hanya usaha akomodasi pada sektor pariwisata saja, namun semua sektor secara menyeluruh harus dibangun kembali. Pemulihan ekonomi harus terus diupayakan secara bertahap. Dengan diaktifkannya kembali kegiatan di beberapa sektor, menjadi jalan pembuka langkah perbaikan ekonomi. Kuncinya adalah penyesuaian dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Masyarakat harus memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Kita semua berharap pandemi segera berakhir dan tetap optimis bahwa kondisi ekonomi akan semakin membaik di masa mendatang.



Membangun Asa Digitalisasi Refleksi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

Perdy Irmawan Prayitno

Statistisi BPS Kota Depok

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1995 menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas). Tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah kebangkitan teknologi nasional yang ditandai oleh penerbangan perdana pesawat N-250. Hasil karya putra-putri bangsa ini merupakan bukti keberhasilan menumbuhkan inovasi dan mengembangkan teknologi nasional.

Peringatan Hakteknas sejatinya sebagai wujud apresiasi Pemerintah terhadap prestasi anak bangsa. Peringatan ini juga seharusnya menjadi momentum untuk menumbuhkan sikap dan kehendak guna mengembangkan bahkan menciptakan sesuatu di bidang teknologi. Momentum ini seharusnya menjadi pemacu kreativitas anak bangsa guna bersaing dengan negara lain yang telah jauh menerapkan teknologi canggih.

Komitmen bersama untuk memajukan kreativitas anak bangsa saat itu sangat membahagiakan semua pihak. Arah penentuan masa depan bangsa khususnya di bidang teknologi terlihat menggairahkan. Namun kini, komitmen itu kian pudar bahkan terlupakan, sehingga peringatan Hakteknas hanya berlalu begitu saja.

Salah satu indikasi terlupakannya kebangkitan teknologi saat ini adalah tingkat kompetitif digital yang

masih sangat rendah. Hasil survei IMD *World Digital Competitiveness* pada 2019 menempatkan Indonesia diperingkat 56 dari 63 negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia berada lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN. Presiden menginstruksikan jajarannya agar hal ini ditekankan untuk menjadi perhatian ke depan.

Maka, dalam rapat terbatas pada 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan percepatan penyediaan layanan internet. Langkah itu akan dilakukan di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Ini sesuai dengan kondisi tidak kurang dari 9 ribu desa atau kelurahan yang hanya mendapatkan sinyal 2G (lemah) dan bahkan hampir 7 ribu desa atau kelurahan yang belum terjangkau internet (*BPS, 2018*).

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan adanya pembangunan pusat data yang terintegrasi dan mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bertalenta digital. Dengan target SDM mencapai 9 juta untuk kurun 15 tahun ke depan (*CNN, 3/8/2020*).

Kebutuhan Internet

Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan internet seakan menjelma menjadi kebutuhan primer di era digitalisasi saat ini. Berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2018, kebutuhan jasa informasi dan komunikasi telah melebihi kebutuhan akan beras (*BPS, 2018*). Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan dunia usaha untuk dapat menyediakan kebutuhan tersebut

dengan biaya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ditambah lagi saat pandemi seperti sekarang ini.

Sejak pandemi melanda Indonesia pada awal Maret 2020, penggunaan jasa informasi dan komunikasi meningkat pesat. Di masa pandemi ini, jasa informasi dan komunikasi tumbuh signifikan mencapai 10,88 persen pada kuartal kedua 2020. Salah satu diantaranya adalah penggunaan jasa internet.

Dapat dimaklumi, sejak pandemi sebagian besar aktivitas masyarakat beralih ke media internet. Dari bekerja, belajar, hingga memenuhi kebutuhan pokok. Secara tidak langsung, wabah Covid-19 "memaksa" masyarakat untuk menggunakan internet sebagai media dalam beraktivitas.

Namun, penggunaan media internet di Indonesia masih menyisakan sejumlah masalah. Sebagai negara yang cukup luas dan memiliki banyak pulau terpencil, sudah pasti sinyal internet menjadi masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Satu diantaranya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara *online* di masa pandemi ini. Perbaikan dan penyediaan layanan internet seharusnya ditingkatkan.

Mungkin permasalahan ini tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat perkotaan, namun bagaimana dengan masyarakat di perdesaan?

Kendala yang dihadapi masyarakat di wilayah perdesaan bukan hanya ketersediaan layanan internet, namun juga alat dan perangkatnya. Tidak sedikit guru yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan belajar

mengajar di rumah siswa karena ketidakterersediaan internet. Semoga gagasan Presiden dalam menyediakan layanan internet untuk lebih dari 12 ribu desa atau kelurahan segera terealisasi. Sehingga layanan internet dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.

SDM Bertalenta

Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan SDM yang berkualitas. Ini terlihat dari banyaknya karya anak bangsa yang sudah diakui di dalam negeri bahkan dunia internasional. Namun, seperti bertepuk sebelah tangan, inovasi anak bangsa terkadang kurang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Sebut saja pesawat N-250, mobil Esemka hingga mobil Selo (tenaga listrik) yang tidak terdengar lagi perkembangannya.

Terkadang, karya anak bangsa lebih diakui di luar negeri. Sebut saja penemuan sistem telekomunikasi 4G dan pencarian sumber minyak bumi dengan rumus matematika. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada karya anak bangsa. Sehingga karya anak bangsa dapat dinikmati oleh negeri sendiri.

Di era digitalisasi ini, sudah sewajarnya Presiden menginginkan talenta digital untuk membangun negeri. Belajar dari pengalaman sebelumnya, sudah saatnya Pemerintah lebih memperhatikan talenta-talenta yang akan membangun bangsa ini dengan memberikan kebebasan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka.

Sementara itu, pembinaan bibit-bibit talenta digital dapat ditanamkan sejak masih di sekolah. Pemerintah seharusnya mendorong sekolah untuk menyediakan jurusan-jurusan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya jurusan yang berhubungan dengan digitalisasi.

Selain itu, upaya informal dapat dioptimalkan, seperti memberikan keterampilan khusus di bidang digital. Upaya ini diharapkan dapat memenuhi target kebutuhan talenta digital 15 tahun ke depan.

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, sudah sepatutnya kita semua menyadari bahwa teknologi telah berkembang pesat. Saat ini, tren kehidupan telah dipenuhi oleh digitalisasi. Bisa tidak bisa, akhirnya kita dipaksa untuk mengikuti tuntutan zaman agar tidak tersingkir dengan sendirinya.

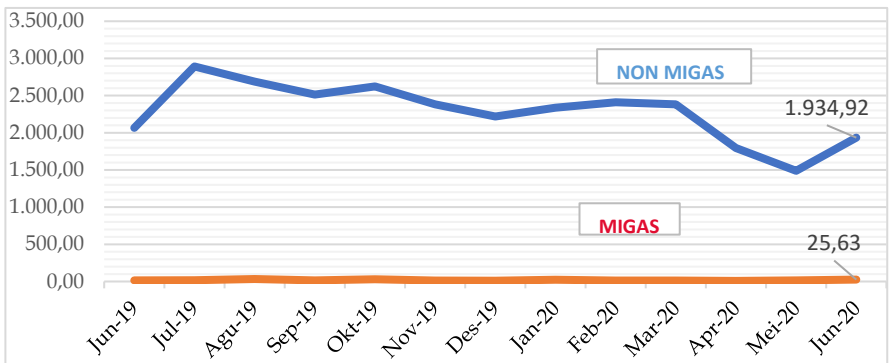
Ceruk Ekspor Jawa Barat di Tengah Pandemi

Marisa Intan

Fungsional Umum BPS Provinsi Jawa Barat

Belum pulih dari kontraksi pada periode akhir tahun 2019, ekspor Jawa Barat kembali terpuruk dihantam badai Pandemi Covid-19 pada paruh pertama tahun 2020. Kinerja positif tahunan selama empat tahun terakhir gagal dipertahankan dengan perlambatan laju sekalipun. Rilis data BPS menunjukkan nilai ekspor total luar negeri Jawa Barat secara kumulatif Januari - Juni 2020 terkontraksi hingga dua digit yaitu sebesar 14,18% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Permintaan ekspor menukik tajam seiring penurunan permintaan global akibat pelemahan daya beli sehingga berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi.

Grafik
Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri Jawa Barat
Juni 2019 - Juni 2020 (Juta USD)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Ekspor dalam perekonomian wilayah memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu peranan ekspor dapat memperbesar cadangan devisa. Potret data Jawa Barat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahunan pada triwulan II-2020 berkontraksi sebesar 5,98% dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan pada triwulan II-2019 yang meningkat sebesar 5,67 persen. Angka ini merupakan indikasi perekonomian Jawa Barat mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan.

Penurunan Permintaan Ekspor Global

Penurunan permintaan ekspor global terutama akibat proteksi terhadap aktivitas perdagangan internasional, dimana anggaran dioptimalkan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Meski demikian, di beberapa negara permintaan terhadap beberapa komoditas esensial dan strategis masih memiliki peluang cukup besar. Sebagai contoh seperti dilansir dalam *Harvard Business Review* edisi 15 April 2020 dalam salah satu artikelnya menjelaskan ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor produk kebutuhan dasar sehari-hari serta produk esensial terkait pandemi masih tinggi. Hal ini disebabkan karena spesifikasi industri manufaktur untuk produk-produk tersebut masih terdapat di negara-negara subkontrak produk dan mitra dagang Amerika Serikat. Dengan kata lain, Amerika Serikat memiliki spesialisasi khusus dalam industri manufaktur dengan karakteristik padat riset teknologi dan efisiensi tinggi.

Kemudian seperti dikutip dari *New York Magazine* edisi 13 April 2020 perusahaan yang mampu mencatatkan profit saat pandemi berlangsung adalah perusahaan 1) *Regeneron Pharmaceuticals*, mengembangkan obat antibodi yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh untuk virus ebola dan MERS; 2) *Netflix*, perusahaan penyedia hiburan *streaming*; 3) *Amazon*, sebuah *market place* yang memfasilitasi pembelian *retail online* dan penyedia layanan penyimpanan data *cloud*, perusahaan ini mengambil peluang dengan banyak aktivitas yang berbasis online semakin banyak permintaan untuk ruang server *cloud*; 4) *Clorox*, perusahaan yang memproduksi tissue disinfektan; 5) *Citrix* dan *Zoom*, perusahaan yang menjual teknologi untuk bekerja jarak jauh seperti fasilitas *meeting online* 6) *J.M. Smucker and Co.*, perusahaan yang menjual makanan kemasan untuk pasar ritel.

Peluang Ekspor

Karakteristik proses bisnis yang terjadi pada masing-masing negara tujuan ekspor saat era Pandemi Covid-19 menarik untuk dicermati. Amerika Serikat merupakan salah satu contoh kasus karena kontribusi negara ini sangat besar pada ekspor Jawa Barat.

Pertama, fakta menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki ketergantungan pada impor produk kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga dapat digarisbawahi bahwa produk dalam klasifikasi tersebut sebagai target ekspor.

Kedua, perusahaan yang berhasil bertahan dan mencatatkan profit tinggi saat pandemi membutuhkan

dukungan input bahan baku dan bahan pendukung secara berkesinambungan. Dalam hal ini perusahaan farmasi membutuhkan dukungan bahan baku berupa berbagai produk kimia beserta bahan pendukung untuk pengemasan produk seperti karet dan barang dari karet; produk tekstil sintetis; kertas; plastik dan perangkat optik. Perusahaan makanan kemasan membutuhkan produk bahan makanan mentah yang berkualitas serta pendukung untuk pengemasan produk seperti produk yang berasal dari kertas, alumunium foil dan plastik.

Ketiga, perusahaan penyedia layanan *platform streaming digital* dan *online meeting* membutuhkan dukungan input lebih spesifik dengan karakteristik *high tech*. Contoh komoditas yang relevan berupa instrumen perangkat keras dan lunak. Produk tersebut dalam perdagangan internasional termasuk dalam klasifikasi mesin/peralatan listrik termasuk didalamnya produk elektronik, mesin, perekam suara, TV dan sebagainya.

Keempat, produk krusial terkait pandemi seperti antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker merupakan kategori produk dengan permintaan tinggi secara global. Meski demikian, ekspor komoditas kategori ini harus mengacu pada kebutuhan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Setelah kebutuhan nasional terpenuhi, sektor manufaktur dapat memperbesar skala produksi dengan dukungan kebijakan.

Kelima, selama pandemi berlangsung Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian mencatat beberapa komoditas pertanian asal Jawa Barat mengalami

peningkatan permintaan ekspor pada semester I-2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu teh, kopi, jeruk purut, sayuran, sarang burung walet. Pada periode yang sama, tanaman kaktus mencatatkan kenaikan volume ekspor empat kali lipat. Secara umum komoditas hortikultura Jawa Barat menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor unggulan.

Keenam, diversifikasi negara tujuan ekspor misalnya pangsa negara-negara di Afrika dan Asia selain negara-negara ASEAN. Secara statistik pangsa ekspor selain negara tujuan utama Ekspor Jawa Barat masih menyimpan potensi cukup besar dengan peranan sebesar 29,41 persen terhadap total ekspor pada paruh pertama Tahun 2020.

Tantangan Ekspor

Ironisnya ketika peluang ekspor terbuka, industri manufaktur Jawa Barat memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku. Sebagai catatan, impor bahan baku Jawa Barat Semester I-2020 mencapai 80,29% dari total impor. Beberapa negara importir utama Jawa Barat seperti China, Jepang dan Korea Selatan pada Semester I-2020 mengalami perlambatan dan penurunan ekonomi. Ketika roda ekonomi global melambat dengan sendirinya menjadi konstrain terhadap aktivitas ekspor Jawa Barat. Komitmen penuh dari pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung program substitusi impor guna menjamin siklus produksi yang berkesinambungan.

Selain itu, identifikasi komoditas peluang ekspor saat Pandemi Covid-19 tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak didukung kebijakan yang tepat serta keberpihakan terhadap pelaku usaha. Peningkatan eksistensi industri manufaktur dapat ditempuh dengan melakukan pergeseran usaha sebagai adaptasi di era Pandemi. Seluruh strategi ini diharapkan dapat membuat aktivitas ekspor kembali menggeliat. Sikap optimis perlu dikedepankan di tengah situasi seperti ini. Ceruk kesempatan dari setiap momentum selalu terbuka jika cermat dalam memanfaatkan peluang.

Masa Depan Ekonomi Indonesia

Perdy Irmawan Prayitno

Statistisi BPS Kota Depok

Beberapa bulan dilanda pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia kian terpuruk. Setelah pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,97 persen, pada kuartal kedua kondisi ekonomi Indonesia semakin tererosok hingga minus 5,32 persen. Bagaimana dengan negara lain?

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 memorakporandakan ekonomi Indonesia bahkan dunia. Tidak kurang dari 9 negara di dunia yang telah mengalami resesi ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Sebut saja Amerika Serikat yang berlabel sebagai negara adidaya pun tidak luput dari terjangan badai resesi ekonomi.

Penerapan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terpaksa dilakukan sejumlah negara sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Di satu sisi, *lockdown* dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun di sisi lain, secara tidak langsung dapat melemahkan (resesi) perekonomian.

Pesimis dan Optimis

Sejak Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua (-5,32%), isu resesi ekonomi kian hangat diperbincangkan. Tidak sedikit yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi karena perekonomian dalam negeri belum mampu tumbuh positif pada kuartal ketiga. Namun

masih banyak yang optimis kalau Indonesia bisa terhindar dari jurang resesi. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut atau lebih.

Jika melihat kondisi Indonesia yang sedang berjuang melawan Covid-19, resesi ekonomi seakan tidak terelakkan lagi. Tren Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) pada kuartal pertama turun 66,9 Triliun dibanding kuartal sebelumnya dan semakin turun (-113,4 Triliun) pada kuartal berikutnya (*q-to-q*). Ini sejalan dengan waktu penerapan ketat PSBB yang diberlakukan kurang lebih 1 bulan pada kuartal pertama dan 2 bulan pada kuartal kedua. Jika tren ini tidak berubah, maka sudah dipastikan Indonesia benar-benar akan mengalami resesi.

Kelonggaran PSBB atau yang dikenal dengan istilah *new normal* membuka peluang untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia. Namun perlu dipahami, membangkitkan perekonomian tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Jika berkaca pada pencapaian GDP kuartal keempat tahun sebelumnya, maka ekonomi Indonesia masih berkontraksi di angka 1 hingga 2 persen.

Kepesimisan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditepis dengan cara biasa. Perlu "gebrakan" ekonomi yang konkret, sehingga ekonomi tumbuh positif dan terhindar dari resesi. Dan yang terpenting Pemerintah dapat menjamin tidak terjadi kepanikan ekonomi di semua lapisan masyarakat dan pengusaha. Serta sangat diperlukan kerjasama masyarakat untuk keluar dari masalah ini.

Tidak hanya berdiam diri, Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk menangkal resesi. Dari pemberian subsidi kepada UMKM hingga pemberian insentif kepada karyawan swasta serta pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan. Hal ini dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat yang kian menurun selama PSBB diberlakukan. Kebijakan ini memberikan secerca rasa optimis untuk keluar dari bayang-bayang resesi.

Daya Upaya

Ratusan bahkan ribuan triliun yang dikucurkan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini seharusnya dikaji lebih dalam agar tetap guna dan tepat sasaran. Berdasarkan GDP kuartal kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto turun cukup signifikan (-181,7 triliun). Melihat hal ini, dirasa pemberian insentif kepada karyawan swasta (31,2 triliun), pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan (28,5 triliun), serta adanya subsidi untuk UMKM sudah cukup tepat.

Bicara sasaran, kategori wilayah dan lapangan usaha seharusnya menjadi fokus utama Pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Fokus wilayah dapat diutamakan di pulau Jawa dengan distribusi ekonomi tertinggi (58,55%) sekaligus wilayah terdampak Covid-19 terbanyak (kontraksi 3,96%), tanpa harus mengesampingkan wilayah lainnya.

Transportasi (-30,84%) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (-22,02%) menjadi dua dari sekian lapangan usaha yang sangat terpukul pada kondisi

pandemi Covid-19. Regulasi transportasi seharusnya dapat dikaji ulang agar ekonomi pada lapangan usaha ini dapat tumbuh sewajarnya tanpa melupakan himbauan protokol kesehatan. Begitu juga pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sementara itu, peran serta semua lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Kebijakan Pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Masyarakat seharusnya benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Sehingga kesehatan tetap terjamin dan roda perekonomian dapat kembali normal. Inilah saatnya, kita dapat menjadi pahlawan kemanusiaan sekaligus pahlawan ekonomi. Tinggalkan egoisme dan raihlah kebaikan.

Resesi di Tengah Pandemi

Perdy Irmawan Prayitno

Statistisi BPS Kota Depok

Indonesia resmi masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Kepastian ini didapat setelah 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia bernilai negatif. Terjadi kontraksi 5,32 persen pada kuartal kedua dan masih kontraksi 3,49 persen pada kuartal ketiga (BPS, 2020). Sesuai definisi, kondisi ini dapat dikatakan telah mengalami resesi.

Pandemi Covid-19 membuat Indonesia tidak dapat menghindari dari badai resesi ekonomi. Masih banyaknya pasien terkonfirmasi membuat Indonesia harus berjuang melawan Covid-19. Bermula dari masalah kesehatan, namun sangat berdampak pada masalah ekonomi. Pemerintah seharusnya cermat dalam mengambil kebijakan guna menyelesaikan 2 permasalahan besar tersebut satu per satu atau bahkan secara bersamaan.

New Normal

Pelonggaran PSBB dengan adab kebiasaan baru (*new normal*) di sejumlah daerah berdampak kepada perekonomian Indonesia. Kebijakan ini diambil guna menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri. Sektor-sektor yang sebelumnya terhenti, secara perlahan dapat bergerak kembali. Bergeraknya usaha harus diiringi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-

19 yang ketat. Kebijakan ini seakan ampuh untuk mengangkat keterpurukan ekonomi Nasional.

Ekonomi Indonesia tumbuh positif selama kuartal ketiga. Kelonggaran PSBB yang diterapkan mampu memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh sebesar 5,05 persen dibanding kuartal sebelumnya ($q-to-q$). Pertumbuhan ini dirasakan di semua sektor lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga memberikan secerca rasa optimis untuk mampu keluar dari jurang resesi. Ini terlihat pada sejumlah lapangan usaha yang terperosok pada kuartal sebelumnya, berangsur-angsur pulih pada kuartal ketiga. Jika peningkatan ini terus terjaga, tidak mustahil ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada kuartal keempat. Namun masih cukup berat untuk mencapai pertumbuhan positif pada tahun ini.

Transportasi, pergudangan, dan penyediaan akomodasi makan minum menjadi lapangan usaha yang sangat "menikmati" kelonggaran PSBB. Transportasi dan pergudangan menjadi lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam (-29,18%) pada kuartal sebelumnya telah tumbuh membaik pada kuartal ketiga (24,28%). Begitu juga dengan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 14,79 persen dari kuartal sebelumnya yang berkontraksi sebesar 22,31 persen (BPS, 2020).

Namun sayang, kelonggaran PSBB yang diberikan, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. Kasus terkonfirmasi Covid-19 selama kuartal ketiga

bertambah signifikan (230 ribuan) dibanding selama kuartal sebelumnya (54 ribuan). Hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah dalam penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian Nasional.

Pengawasan dan evaluasi seharusnya menjadi fokus Pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan semestinya. Namun Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, perlu kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan kebijakan ini. Pelaku usaha tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Masyarakat juga seharusnya patuh kepada anjuran yang ditetapkan dan saling mengingatkan antar sesama betapa pentingnya menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Ini semua untuk kebaikan dan keselamatan bersama.

Subsidi Pemerintah

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Ini tergambar dari Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga meningkat 4,7 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Stimulus yang diberikan untuk karyawan swasta maupun pegawai negeri dirasa sangat efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Kepastian pendapatan menjadi salah satu faktor terjaganya daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang stabil, masyarakat tidak akan ragu untuk membelanjakan uangnya. Namun dengan bayang-bayang

dampak yang akan ditimbulkan oleh resesi dan belum ada tanda-tanda meredanya pandemi Covid-19, membuat banyak masyarakat menahan untuk membelanjakan uangnya.

Sementara itu, bantuan modal kepada UMKM diharapkan akan membangkitkan gairah usaha mikro kecil di tengah pandemi. Dengan subsidi 2,4 juta per UMKM diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori.

Berdasarkan PDB menurut pengeluaran, perubahan inventori menjadi komponen yang sangat terpuruk pada kuartal ketiga (-0,29%). Ini menandakan kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan persediaan atau bahkan ketidakmampuan usaha untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan masalah Covid-19, agar memberikan kepastian kestabilan ekonomi dalam negeri. Terlebih lagi perhatian tersebut ditujukan untuk lapangan usaha yang memberikan andil besar pada struktur PDB, seperti industri pengolahan.

Industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang sangat terpuruk di masa pandemi Covid-19. Ini sangat dimaklumi karena adanya penerapan PSBB yang memperlambat laju distribusi bahan baku maupun barang produksi. Namun perhatian ini sebaiknya tidak mengenyampingkan lapangan usaha lain yang memang masih membutuhkan.

Semoga dengan langkah dan strategi yang diambil Pemerintah dapat menyelesaikan masalah Covid-19 sekaligus ekonomi. Mari bersama-sama membantu

Pemerintah dengan tetap menerapkan hidup sehat dan menjalankan anjuran 3M. Semoga dengan bersama, kita dapat keluar dari permasalahan yang menimpa bangsa ini.

<https://jabar.bps.go.id>

Kilas Balik Indonesia Tahun 2020

Fitria Nur Diana

Statistisi BPS Kabupaten Bekasi

Sepanjang 2020, wabah Covid-19 menjadi masalah terbesar dalam skala global, termasuk juga bagi Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh untuk mengatasi dampak yang ada. Namun kenyataannya, pandemi ini telah menyerang hampir semua sisi kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Kontraksi ekonomi akibat pandemi tergambar jelas dari tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen selama kurang lebih 6 tahun ke belakang akhirnya mulai melambat. Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh hanya sebesar 2,97 persen (*y-on-y*), atau mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Pada masa ini wabah Covid-19 baru saja terdeteksi keberadaannya di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial (*social/physical distancing*) yang mulai diberlakukan pada pertengahan Maret 2020 mulai memperlambat jalannya roda perekonomian Indonesia.

Sayangnya, penyebaran Covid-19 kian cepat dan bertambah parah pada triwulan II-2020, hingga akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kian terpuruk, hingga berkontraksi sebesar 5,32 persen (*y-on-y*), atau 4,19

persen (q - to - q). Angka ini merupakan yang terendah dalam sejarah, selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Pada sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terjadi di hampir semua lapangan usaha, kecuali Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,84 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,02 persen. Sedangkan pada sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini telah menciptakan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat. Ketidakpastian kapan berakhirnya masa pandemi, kebingungan akan pemenuhan kebutuhan hidup, dan ancaman akan kematian menjadi stresor bagi banyak orang. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat.

Demi mencegah situasi semakin tidak kondusif, pemerintah kemudian melakukan relaksasi pembatasan sosial. Hal ini memberi dampak positif pada proses pemulihan ekonomi, hingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 membaik dengan angka -3,49 persen. Meskipun masih mengalami kontraksi, namun telah ada indikasi pembalikan arah (*turning point*) dari aktifitas-aktifitas ekonomi nasional ke zona positif.

Fenomena serupa juga dapat dilihat pada indikator daya beli masyarakat, yang tergambar dari angka inflasi. Mulai dari Januari hingga September 2020, tren nilai inflasi

mengalami penurunan yang cukup dalam. Bahkan deflasi terjadi pada Juni hingga September 2020. Peristiwa ini mencerminkan daya beli masyarakat yang kian menurun akibat terdampak pandemi. Tren inflasi kemudian dapat kembali naik mulai Oktober 2020.

Daya beli masyarakat tersebut terkait juga dengan iklim di dunia usaha. Perekonomian yang lesu memaksa dilakukannya efisiensi dalam bentuk pengurangan produksi, pengurangan jam kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Survei ketenagakerjaan yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang). Data Sakernas juga menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh setahun terakhir turun 5,20 persen, dari 2,91 juta menjadi 2,76 juta rupiah.

Disamping itu, hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa secara umum ada 8 dari setiap 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, yaitu 82,29 persen Usaha Menengah Besar (UMB) dan 84,20 persen Usaha Menengah Kecil (UMK). Sekitar 19 persen pelaku usaha

memperkirakan bahwa mereka hanya mampu bertahan maksimal 3 bulan jika tidak ada bantuan.

Meskipun pemerintah telah berupaya menurunkan bantuan dalam bentuk tunai maupun stimulus ekonomi, namun tidak sedikit masyarakat yang akhirnya jatuh ke bawah garis kemiskinan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Selain dampak ekonomi, pandemi Covid-19 juga telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pembatasan kegiatan di luar rumah membentuk pola baru dalam bekerja, sekolah, dan beribadah. Mekanisme *Work From Home* (WFH) dan Belajar Dari Rumah (BDR) menjadi salah satu pilihan dalam situasi seperti ini. Ibadah di tempat ibadah pun dibatasi, dan dianjurkan hanya dilakukan dari rumah saja. Masyarakat harus terbiasa dengan perubahan gaya hidup dan sistem sosial yang baru. Interaksi sosial wajib menggunakan protokol kesehatan. Pola interaksi konvensional pun bertransformasi menjadi pola interaksi virtual dan serba digital.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dan melek teknologi jika tidak ingin tertinggal. Pada dunia

usaha, pemanfaatan TIK menjadi salah satu strategi untuk bertahan dan meningkatkan pendapatan melalui bentuk pemasaran *online*. Hal ini mendorong pesatnya perkembangan TIK di Indonesia. Survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2019 hingga kuartal II 2020 sebanyak 73,7 persen dari populasi Indonesia atau setara 196,7 juta pengguna. Survei ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah pengguna internet Indonesia sebesar 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.

Di sisi lain, fenomena perubahan juga terjadi pada pola mobilitas masyarakat. *Trade off* antara aktifitas di tempat kerja/sekolah dan tempat tinggal akibat adanya kebijakan WFH maupun BDR menyebabkan turunnya tingkat mobilitas masyarakat. Hasil tinjauan *big data* terhadap dampak Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan bahwa paska diberlakukannya WFH, aktivitas masyarakat di rumah meningkat sebesar 9,5 persen, sementara aktivitas di tempat kerja menurun sebesar 16,5 persen. Pemberlakuan PSBB di beberapa daerah juga turut menekan mobilitas masyarakat ke tempat-tempat umum. Efek positif yang muncul dari fenomena tersebut adalah meningkatnya kualitas udara di beberapa daerah melalui penurunan tingkat polutan.

Pada akhirnya, ancaman Covid-19 belum berakhir. Kondisi ini masih menjadi tantangan untuk dihadapi bersama. Protokol kesehatan harus menjadi budaya baru yang dianut oleh seluruh masyarakat. Bantuan pemerintah masih menjadi andalan bagi mereka yang berhak menerimanya. Untuk mengatasi dampak yang ada

diperlukan sinergi, peran serta dan kerja sama semua pihak. Harapan tentunya tak pernah pupus agar kondisi tahun depan dapat lebih baik.

<https://jabar.bps.go.id>

Pandemi dan Pariwisata di Akhir 2020

Dadan Rukmantara
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Seperti lazimnya yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya dimana pandemi Covid-19 belum terjadi, setiap akhir tahun adalah waktunya para pelaku bisnis di sektor pariwisata meraup keuntungan yang besar jika dibanding bulan-bulan sebelumnya diawal sampai pertengahan tahun, namun kali ini sangat berbeda keadaannya dimana sudah hampir setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan sudah menjadikan kondisi perekonomian mengalami pelemahan yang cukup signifikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi di kuartal III-2020 ini. pertumbuhan ekonomi di periode Juli 2020 hingga September 2020 sebesar minus 3,49% yoy, "Sehingga secara kumulatifnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal I-2020, kuartal II-2020, dan kuartal III-2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,03% yoy," kondisi ini salah satunya penyebabnya adalah dipasok dari kegiatan disektor pariwisata yang mengalami penurunan aktifitas dimasa pandemi Covid-19 ini.

Sejumlah sektor industri mengalami kondisi penurunan disegala aspek kegiatan yang berimbas pula terhadap penurunan keuntungan secara bisnis akibat pandemi virus SARS-CoV-2 ini. Tak terkecuali sektor pariwisata. Oleh sebab demikian, hal ini memerlukan upaya serius dalam penanganan penanggulangannya agar

sesegera mungkin bisa keluar dari zona pandemi yang mengkhawatirkan ini.

Menyikapi jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia yang mengalami penurunan hingga hampir mencapai angka 44 persen selama pandemi ini jika dibandingkan dengan tahun yang lalu berdasarkan data organisasi pariwisata dunia (UNWTO), para pelaku usaha dibidang pariwisata dipandang harus segera bisa melakukan terobosan-terobosan baru, ide-ide yang cemerlang serta membuat Inovasi yang baru dan tepat dalam menyikapi isu-isu terutama kesehatan yang mulai dirasakan menjadi suatu keadaan yang mengkhawatirkan dimasa pandemi Covid-19 ini.

Upaya antisipasi penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah di semua sektor usaha menjadi hal yang mutlak dan perlu serta penting dilakukan segera tak terkecuali untuk sektor usaha pariwisata sebagai salah satu sektor usaha yang bisa memberikan masukan devisa kepada negara yang cukup besar.

Fokus pada segmen wisatawan nusantara (wisnus) adalah salah satu upaya pemulihan ditengah ambruknya sektor pariwisata disaat pandemi Covid-19 ini, seperti dengan mengoptimalkan platform digital (*optimizing digital platform*), mengoptimalkan pengguna platform digital seperti media sosial untuk meningkatkan distribusi produk mungkin bisa dijadikan salah satu strategi yang lumayan dinilai cukup efektif dan hemat serta efisien dalam menguarangi biaya promosi dan pemasaran, ini mungkin bisa dijadikan tahapan awal dalam proses pemulihan sektor pariwisata, disamping fokus pada

subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya, sebab dari tiga subsektor unggulan ini dinilai memiliki kontribusi yang paling besar dalam menyokong sektor kegiatan pariwisata, juga selain itu bisa dengan melakukan diversifikasi dan bundling produk-produk pariwisata serta jasa-jasa pariwisata yang baru sampai dengan kegiatan marketing yang bisa dengan tepat sasaran mengena pada pasar yang diinginkan dimasa pandemi ini.

Tak ketinggalan sektor transportasi, sektor ini juga memiliki andil yg cukup besar berpengaruh dalam bisnis pariwisata dimasa pandemi ini, transportasi darat, laut dan juga udara perlu diperhatikan dan memperhatikan jasa dan pelayanan baru yang sesuai dengan masa pandemi ini, bagaimana caranya agar para wisatawan mau dan tertarik menggunakan moda transportasi yang dirasa sehat, dipercaya dan menjanjikan rasa aman dimasa pandemi ini.

Demikian upaya-upaya pemulihan agar sektor pariwisata tidak semakin terpuruk sebagai salah satu penyokong devisa pendapatan keuangan negara yang cukup besar perlu segera dilakukan, mengoptimalkan platform digital (*optimizing digital platform*), melakukan terobosan-terobosan baru, ide-ide yang cemerlang serta membuat Inovasi di bidang kebersihan, mengoptimalkan pengguna platform digital seperti media sosial dan sebagainya harus bisa bersinergi dengan sektor-sektor yang lain seperti sektor transportasi

Memang sepiantas terasa begitu sulit untuk dilaksanakan semua upaya-upaya tersebut diatas, tetapi dengan kebersamaan dan kekompakan dari semua stakeholder, yakin kita semua bisa segera keluar dari

masalah pandemi ini menuju era *new normal*, adaptasi kehidupan baru yang lebih baik.

<https://jabar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustafa No. 43
Bandung – Jawa Barat 40124
Telp : 022.7272595 – 7201696
Email : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5745-80-5 (PDF)



9 786025 745805